

BAB II

EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

A. Gambaran Umum Kondisi Daerah

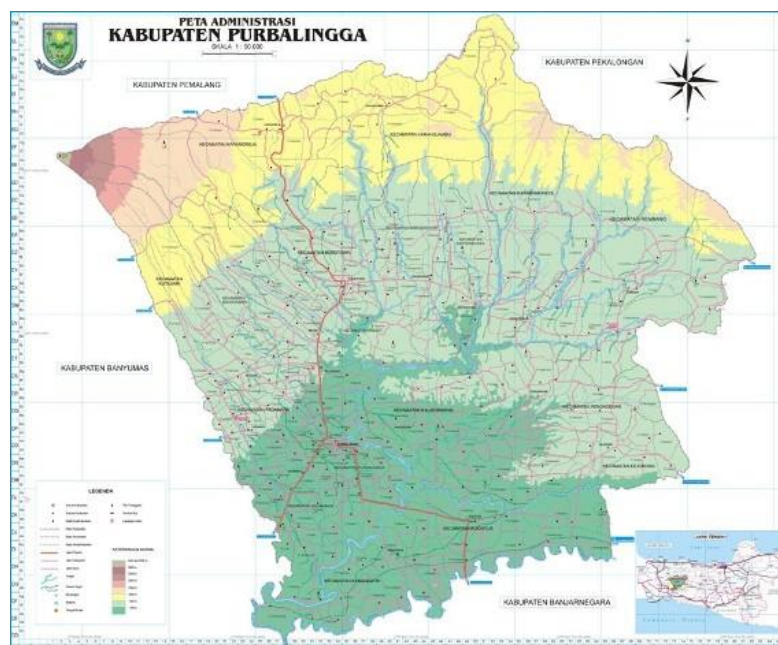
1. Aspek Geografi dan Demografi

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Purbalingga memiliki wilayah seluas 77.764,122 ha atau sekitar 2,39 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 kecamatan, 224 desa, 15 kelurahan, 886 dusun, 1.530 RW, dan 5.058 RT. Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Banyumas
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Banyumas.

Gambar 2.1 Peta Administratif Kabupaten Purbalingga



b. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Purbalingga secara geografis terletak di bagian barat daya wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan posisi pada 109°11' – 109°35' Bujur Timur dan 7°10' – 7°29' Lintang Selatan.

c. Kondisi Topografi

Secara fisiografis, Kabupaten Purbalingga terletak pada wilayah perbatasan antara Zona Serayu Utara dan Zona Vulkanik Kwarter. Wilayah Kabupaten Purbalingga memiliki ketinggian tempat antara 23 meter – 3.432 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan kondisi topografi, wilayah Kabupaten Purbalingga dibagi dalam dua kategori wilayah, yakni :

1. Bagian utara merupakan wilayah berbukit-bukit dengan kelerengan lebih dari 40 persen. Wilayah ini meliputi Kecamatan Karangreja, Karangjambu, Bobotsari, Karanganyar, Kertanegara, Rembang, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari, dan Mrebet.
2. Bagian selatan merupakan wilayah dengan tingkat kemiringan berkisar antara 0–25 persen. Wilayah ini meliputi Kecamatan Kalimanah, Padamara, Purbalingga, Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Pengadegan, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari, dan Mrebet.

d. Kondisi Geologi

Berdasarkan kondisi geologi, wilayah Kabupaten Purbalingga terdiri dari batuan sedimen klasik berupa batuan andesit, sirtu, batu pasir darat, batu lempung, dan trass dengan persebaran sebagai berikut:

Komposisi litologi batuan yang terdapat di Kabupaten Purbalingga terdiri atas:

- Alluvium endapan rawa dan danau, terutama tersusun oleh lempung, umumnya bersifat kedap air.
 - Endapan alluvium gunung api, terdiri dari bahan-bahan tak mengeras, mengandung bongkah-bongkah batuan gunung api, tersusun oleh andesit sampai basalt dengan kelulusan terhadap air rendah sampai tinggi.
 - Lava andesit berongga asal Gunung Slamet dengan kelulusan terhadap air tinggi sampai sedang.
 - Endapan vulkanik tua yang terdiri dari aliran lava yang bersifat andesit sampai basalt dan breksi. Kelulusan terhadap air rendah sampai sedang.
 - Batu pasir tufaan, batupasir, konglomerat, tufa, breksi dan lempung dengan kelulusan terhadap air rendah.
-

- Napal, napal lempungan dan napal globigerina dengan sisipan tipis tufa pasir, batu gamping pasir, batu pasir, batu lempung dan lempung tufa dengan kelulusan terhadap air rendah

e. Kondisi Klimatologi

Wilayah Kabupaten Purbalingga sebagian wilayahnya terletak di lereng bagian selatan Gunung Slamet dengan rata-rata curah hujan 3.337 mm/tahun dan suhu udara berkisar antara 22°C – 33°C.

f. Kondisi Hidrologi

Kabupaten Purbalingga termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu, Sub-DAS Pekacangan dan Klawing dengan anak-anak sungai sebagai berikut :

1. Sungai Ponggawa
2. Sungai Gemuruh
3. Sungai Kajar
4. Sungai Lemberang
5. Sungai Tlahap
6. Sungai Soso
7. Sungai Lebak
8. Sungai Tunggunggunung
9. Sungai Laban
10. Sungai Kuning
11. Sungai Wotan
12. Sungai Gintung
13. Sungai Tambra
14. Sungai Muli

g. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah dapat diketahui dari potensi kawasan budidaya sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Purbalingga tahun 2011-2031. Kawasan budidaya terdiri atas: (1) kawasan peruntukan hutan produksi; (2) kawasan hutan rakyat; (3) kawasan peruntukan pertanian; (4) kawasan peruntukan perikanan; (5) kawasan peruntukan pertambangan; (6) kawasan peruntukan industri; (6) kawasan peruntukan pariwisata; (8) kawasan peruntukan permukiman; dan (9) kawasan peruntukan lainnya.

Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi: hutan produksi; dan hutan produksi terbatas. Hutan produksi memiliki luas kurang lebih 629 hektar meliputi:

1. Kecamatan Bobotsari seluas kurang lebih 52 hektar;
2. Kecamatan Karanganyar seluas kurang lebih 44 hektar;
3. Kecamatan Karangjambu seluas kurang lebih 203 hektar;
4. Kecamatan Kertanegara seluas kurang lebih 218 hektar; dan
5. Kecamatan Karangreja seluas kurang lebih 23 hektar.

Hutan produksi terbatas di Kabupaten Purbalingga memiliki luas kurang lebih 4.727 hektar meliputi:

1. Kecamatan Bobotsari seluas kurang lebih 174 (seratus tujuh puluh empat) hektar;
2. Kecamatan Karanganyar seluas kurang lebih 22 (dua puluh dua) hektar;
3. Kecamatan Karangjambu seluas kurang lebih 1.629 (seribu enam ratus dua puluh sembilan) hektar;
4. Kecamatan Karangmoncol seluas kurang lebih 590 (lima ratus sembilan puluh) hektar;
6. Kecamatan Kertanegara seluas kurang lebih 507 (lima ratus tujuh) hektar;
7. Kecamatan Kutasari seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar;
8. Kecamatan Mrebet seluas kurang lebih 400 (empat ratus) hektar; dan
9. Kecamatan Karangreja seluas kurang lebih 1.393 (seribu tiga ratus sembilan puluh tiga) hektar.

Kawasan hutan rakyat di Kabupaten Purbalingga memiliki luas kurang lebih 30.536 hektar meliputi:

1. Kecamatan Bobotsari seluas kurang lebih 1.527 hektar;
 2. Kecamatan Bojongsari seluas kurang lebih 1.527 hektar;
 3. Kecamatan Bukateja seluas kurang lebih 611 hektar;
 4. Kecamatan Kaligondang seluas kurang lebih 1.527 hektar;
 5. Kecamatan Karanganyar seluas kurang lebih 1.527 hektar;
 6. Kecamatan Karangjambu seluas kurang lebih 4.580 hektar;
 7. Kecamatan Karangmoncol seluas kurang lebih 1.527 hektar;
 8. Kecamatan Karangreja seluas kurang lebih 4.580 hektar;
 9. Kecamatan Kejobong seluas kurang lebih 2.290 hektar;
 10. Kecamatan Kemangkong seluas kurang lebih 153 hektar;
-

11. Kecamatan Kertanegara seluas kurang lebih 1.527 hektar;
12. Kecamatan Kutasari seluas kurang lebih 2.290 hektar;
13. Kecamatan Mrebet seluas kurang lebih 2.290 hektar;
14. Kecamatan Pengadegan seluas kurang lebih 2.290 hektar; dan
15. Kecamatan Rembang seluas kurang lebih 2.290 hektar.

Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas: pertanian tanaman pangan; pertanian hortikultura; perkebunan; dan peternakan. Pertanian tanaman pangan seluas kurang lebih 25.207 hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 16.030 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 9.177 hektar, meliputi:

1. Kecamatan Bobotsari seluas kurang lebih 1.437 hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 910 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 527 hektar;
 2. Kecamatan Bojongsari seluas kurang lebih 1.352 hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 1.086 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 266 hektar;
 3. Kecamatan Bukateja seluas kurang lebih 2.591 hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 1.740 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 851 hektar;
 4. Kecamatan Kaligondang seluas kurang lebih 1.732 hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 868 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 864 hektar;
 5. Kecamatan Kalimanah seluas kurang lebih 1.314 hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 679 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 635 hektar;
 6. Kecamatan Karanganyar seluas kurang lebih 1.539 hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 268 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 1.271 hektar;
 7. Kecamatan Karangjambu seluas kurang lebih 794 hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 319 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 475 hektar;
 8. Kecamatan Karangmoncol seluas kurang lebih 1.909 hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 1.235 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 674 hektar;
-

9. Kecamatan Karangreja seluas kurang lebih 202 hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 85 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 117 hektar;
10. Kecamatan Kejobong seluas kurang lebih 474 hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 382 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 93 hektar;
11. Kecamatan Kemangkon seluas kurang lebih 2.883 hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 1.938 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 945 hektar;
12. Kecamatan Kertanegara seluas kurang lebih 1.215 hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 1.122 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 92 hektar;
13. Kecamatan Kutasari seluas kurang lebih 1.164 hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 1.025 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 139 hektar;
14. Kecamatan Mrebet seluas kurang lebih 2.032 hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 1.997 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 35 hektar;
15. Kecamatan Padamara seluas kurang lebih 1.233 hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 720 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 514 hektar;
16. Kecamatan Pengadegan seluas kurang lebih 154 hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 55 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 99 hektar;
17. Kecamatan Purbalingga seluas kurang lebih 714 hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 259 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 455 hektar; dan
18. Kecamatan Rembang seluas kurang lebih 2.468 hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 832 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 1.634 hektar.

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan seluas kurang lebih 22.616 hektar ditetapkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan. Sementara kawasan Pertanian hortikultura seluas kurang lebih 172.887 hektar meliputi: Kecamatan Bojongsari; Kecamatan Mrebet; Kecamatan Karangreja; Kecamatan Bukateja; Kecamatan Kemangkon; Kecamatan Kaligondang; Kecamatan

Pengadegan; Kecamatan Rembang; Kecamatan Kertanegara; Kecamatan Karangmoncol; Kecamatan Karanganyar; Kecamatan Kutasari; Kecamatan Bobotsari; dan Kecamatan Padamara.

Perkebunan meliputi:

1. Kelapa deres, kelapa dalam, dan tebu seluas kurang lebih 29 hektar berada di Kecamatan Kemangkon;
 2. Kelapa dalam, kopi robusta, lada, kapulaga, mlinjo dan tebu seluas kurang lebih 3.584 hektar berada di Kecamatan Kejobong;
 3. Kelapa dalam, melati gambir, dan tebu seluas kurang lebih 22 hektar berada di Kecamatan Bukateja;
 4. Kelapa dalam, kopi robusta, lada, kapulaga, mlinjo, dan tebu seluas kurang lebih 5.060 hektar berada di Kecamatan Pengadegan;
 5. Kelapa deres, kopi robusta, glagah arjuna, nilam, teh, karet, cengkeh, dan kapulaga seluas kurang lebih 194 hektar berada di Kecamatan Karangmoncol;
 6. Kelapa deres, kopi robusta, glagah arjuna, kapulaga, tebu, kakao, cengkeh, mlinjo, dan nilam seluas kurang lebih 175 hektar berada di Kecamatan Kertanegara;
 7. Kelapa deres, kopi robusta, glagah arjuna, nilam, teh, kapulaga, tebu, dan cengkeh seluas kurang lebih 404 hektar berada di Kecamatan Karanganyar;
 8. Kelapa dalam, kopi robusta, lada, mlinjo, dan tebu seluas kurang lebih 830 hektar berada di Kecamatan Kaligondang;
 9. Kelapa deres, kopi robusta, casieavera (kayu manis), nilam, teh, pandan, lada, panili, kapuk randu, kapulaga, dan cengkeh seluas kurang lebih 1.779 hektar berada di Kecamatan Rembang;
 10. Kopi robusta, glagah arjuna, casieavera, teh, cengkeh, dan kapulaga seluas kurang lebih 246 hektar berada di Kecamatan Karangreja;
 11. Kelapa deres, kopi robusta, casieavera, nilam, pandan, lada, kapulaga, mlinjo, tebu, dan kakao seluas kurang lebih 988 hektar berada di Kecamatan Mrebet;
 12. Kelapa deres, kopi robusta, casieavera, nilam, panili, mlinjo, dan tebu seluas kurang lebih 555 hektar berada di Kecamatan Bojongsari;
-

13. Kelapa dalam, kelapa deres, kopi robusta, casieavera, nilam, lada, panili, kapulaga, mlinjo, tebu, dan cengkeh seluas kurang lebih 503 hektar berada di Kecamatan Bobotsari;
14. Glagah arjuna, casieavera, nilam, mlinjo, dan kopi robusta seluas kurang lebih 69 hektar berada di Kecamatan Karangjambu; dan
15. Kelapa deres, kopi robusta, casieavera, nilam, teh, lada, mlinjo, jarak pagar, dan cengkeh seluas kurang lebih 322 hektar berada di Kecamatan Kutasari.

Peternakan terdiri atas:

1. Ternak hewan besar berupa sapi, kerbau, dan kuda meliputi: Kecamatan Bobotsari; Kecamatan Bojongsari; Kecamatan Bukateja; Kecamatan Karangjambu; Kecamatan Karangmoncol; Kecamatan Karangreja; Kecamatan Kejobong; Kecamatan Kemangkon; Kecamatan Kutasari; Kecamatan Mrebet; Kecamatan Padamara; dan Kecamatan Rembang;
2. Ternak hewan kecil berupa kambing dan domba meliputi: Kecamatan Bobotsari; Kecamatan Bojongsari; Kecamatan Bukateja; Kecamatan Kaligondang; Kecamatan Karangmoncol; Kecamatan Karangreja; Kecamatan Kejobong; Kecamatan Kemangkon; Kecamatan Kutasari; Kecamatan Mrebet; Kecamatan Padamara; Kecamatan Pengadegan; dan Kecamatan Rembang;
3. Ternak unggas berupa ayam, itik, dan angsa meliputi: Kecamatan Pengadegan; Kecamatan Kejobong; Kecamatan Bobotsari; Kecamatan Bojongsari; Kecamatan Bukateja; Kecamatan Kaligondang; Kecamatan Kalimanah; Kecamatan Karangmoncol; Kecamatan Karangreja; Kecamatan Padamara; dan Kecamatan Kutasari.

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas: (1) kawasan budidaya perikanan darat seluas kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar meliputi: kawasan pembenihan yang berada di Kecamatan Kutasari; kawasan pembesaran yang berada di Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Mrebet, Kecamatan Bojongsari, dan Kecamatan Padamara; kawasan pemasaran yang berada di Kecamatan Purbalingga dan Kecamatan Kutasari; dan kawasan produksi pakan yang berada di Kecamatan Purbalingga dan Kecamatan Kutasari. Sementara itu kawasan pengolahan ikan berada di Kecamatan Purbalingga.

Kawasan peruntukan pertambangan berupa pertambangan mineral non logam dan batuan seluas kurang lebih 15 hektar berada di Desa Gunungwuled Kecamatan Rembang.

Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 298 hektar meliputi: Desa Kebutuh Kecamatan Bukateja; Desa Kedungbenda Kecamatan Kemangkon; Desa Majapura dan Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari; Desa Jetis Kecamatan Kemangkon; Desa Toyareka Kecamatan Kemangkon; Kelurahan Mewek Kecamatan Kalimanah; Kelurahan Karangmanyar Kecamatan Kalimanah; Kecamatan Karangmoncol; Kecamatan Karanganyar; Kecamatan Karangreja; Kecamatan Kalimanah; Kecamatan Bojongsari; Kecamatan Kaligondang; dan Kecamatan Padamara. Sementara itu industri kecil dan mikro menyebar di kawasan permukiman.

Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas:

1. Pariwisata alam meliputi Pendakian Gunung Slamet, Goa Lawa, Bumi Perkemahan Munjul Luhur, dan Agrowisata Serang.
 2. Pariwisata budaya meliputi:
 - a. Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman berada di Kecamatan Rembang;
 - b. Situs Bandagai yang berada di Kecamatan Karangjambu;
 - c. Situs Mujan yang berada di Kecamatan Bobotsari;
 - d. Wisata Batu Menhir yang berada di Kecamatan Karanganyar;
 - e. Wisata Batu Gilang yang berada di Kecamatan Kertanegara;
 - f. Museum Profesor Soegardha Poerbakawatja dan Masjid Agung Darussalam yang berada di Kecamatan Purbalingga;
 - g. Wisata Batu Putin, Situs Onje, dan Situs Batu Tulis yang berada di Kecamatan Mrebet; dan
 - h. Desa Wisata Karangbanjar yang berada di Kecamatan Bojongsari.
 3. Pariwisata buatan meliputi:
 - a. Obyek Wisata Air Bojongsari yang berada di Kecamatan Bojongsari;
 - b. Kolam Renang Tirta Asri yang berada di Kecamatan Kutasari;
 - c. Akuarium Air Tawar Purbasari Pancuran Mas yang berada di Kecamatan Padamara; dan
 - d. Sanggaluri Park yang berada di Desa Kutasari Kecamatan Kutasari.
-

4. Pariwisata Minat Khusus meliputi :

- a. Desa Wisata Agropolitan Serang Kecamatan Karangreja
- b. Desa Wisata Panusupan Kecamatan Rembang
- c. Desa Wisata Tanalum Kecamatan Rembang
- d. Desa Wisata Kedungbenda Kecamatan Kemangkon

Kawasan peruntukan permukiman yang terdapat di Kabupaten Purbalingga terdiri atas:

1. Kawasan permukiman perkotaan diimbangi dengan tersedianya pusat pelayanan yang terkonsentrasi di PKL, PKLp, PPK, dan PPL.
2. Kawasan permukiman perdesaan yang tersebar di seluruh Kabupaten di luar PKL, PKLp, dan PPK

Kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan pertahanan dan keamanan. meliputi: Pangkalan Udara Wirasaba yang meliputi Kecamatan Bukateja dan Kecamatan Kemangkon; Batalyon Infantri 406 Candrakusuma yang berada di Kecamatan Purbalingga; instalasi militer yang berada di Kecamatan Bojongsari; dan medan latihan militer yang berada di Kecamatan Kutasari.

h. Wilayah Rawan Bencana

Di Kabupaten Purbalingga terdapat 5 Kawasan rawan bencana alam, meliputi kawasan rawan bencana banjir; kawasan rawan bencana tanah longsor; kawasan rawan bencana kekeringan; kawasan rawan bencana letusan Gunung Api Slamet; dan kawasan rawan bencana angin topan. Kawasan rawan bencana banjir seluas kurang lebih 12.245 hektar meliputi:

1. Desa Kalialang, Desa Muntang, Desa Sumilir, dan Desa Jetis yang berada di Kecamatan Kemangkon;
 2. Desa Toyareja, Desa Jatisaba, dan Kelurahan Bancar yang berada di Kecamatan Purbalingga;
 3. Desa Lamongan, Desa Penaruban, Desa Tejasari, dan Desa Cilapar yang berada di Kecamatan Kaligondang;
 4. Desa Galuh dan Desa Banjaran yang berada di Kecamatan Bojongsari;
 5. Desa Kaliori, Desa Margasana, dan Desa Kalijaran yang berada di Kecamatan Karanganyar;
 6. Desa Bajong dan Desa Bukateja yang berada di Kecamatan Bukateja;
-

Kawasan rawan bencana tanah longsor memiliki luas kurang lebih 16.510 hektar meliputi:

1. Desa Jetis, Desa Kedungbenda, dan Desa Pegandekan yang berada di Kecamatan Kemangkon;
2. Desa Sidareja dan Desa Cilapar yang berada di Kecamatan Kaligondang;
3. Desa Karangjambu, Desa Sirandu, Desa Sanguwatang, Desa Purbasari, Desa Jinkang, dan Desa Danasari yang berada di Kecamatan Karangjambu;
4. Desa Kaliori, Desa Kalijaran, Desa Maribaya, Desa Brakas, Desa Margasana, dan Desa Banjarkerta yang berada di Kecamatan Karanganyar;
5. Desa Kertanegara, Desa Adiarsa, Desa Darma, Desa Langkap, dan Desa Karangasem yang berada di Kecamatan Kertanegara;
6. Desa Banjaran yang berada di Kecamatan Bojongsari;
7. Desa Banjarsari dan Desa Karangmalang yang berada di Kecamatan Bobotsari;
8. Desa Sindang dan Desa Tangkisan yang berada di Kecamatan Mrebet;
9. Desa Wlahar, Desa Tanalum, Desa Bodaskarangjati, Desa Bantarbarang, Desa Wanogara Wetan, Desa Panusupan, Desa Gunungwuled, Desa Sumampir, Desa Makam, dan Desa Karangbawang yang berada di Kecamatan Rembang; dan
10. Desa Sirau, Desa Tajug, Desa Kramat, Desa Karangsari, dan Desa Pepedan berada di Kecamatan Karangmoncol.

Kawasan rawan bencana kekeringan memiliki luas kurang lebih 29.044 hektar meliputi:

1. Desa Pengadegan, Desa Karangjoho, Desa Larangan, Desa Panunggalan, Desa Bedagas, Desa Tumanggal, Desa Tegalpingen, Desa Tetel, dan Desa Pasunggingan yang berada di Kecamatan Pengadegan;
 2. Desa Langgar, Desa Timbang, Desa Nangkasawit, Desa Pandansari, Desa Pangempon, Desa Kejobong, Desa Gumiwang, Desa Krenceng, dan Desa Lamuk yang berada di Kecamatan Kejobong;
-

3. Desa Kalialang, Desa Muntang, Desa Sumilir, Desa Kedungbenda, Desa Bokol, Desa Pelumutan, Desa Majatengah, dan Desa Kedunglegok yang berada di Kecamatan Kemangkon;
4. Desa Slinga, Desa Arenan, Desa Sidanegara, Desa Pagerandong, Desa Sidareja, Desa Selakambang, Desa Sinduraja, dan Desa Kaligondang yang berada di Kecamatan Kaligondang;
5. Desa Sangkanayu, Desa Sindang, Desa Campakoah, Desa Pengalusan, dan Desa Binangun yang berada di Kecamatan Mrebet;
6. Desa Kalapacung, Desa Gunungkarang, dan Desa Banjarsari yang berada di Kecamatan Bobotsari;
7. Desa Kutabawa, Desa Serang, Desa Siwarak, Desa Karangreja, Desa Tlahab Lor, dan Desa Tlahab Kidul yang berada di Kecamatan Karangreja;
8. Desa Kaliori, Desa Banjarkerta, Desa Karanganyar, Desa Kalijaran, Desa Karanggedang, dan Desa Maribaya yang berada di Kecamatan Karanganyar;
9. Desa Langkap yang berada di Kecamatan Kertanegara;
10. Desa Bumisari, Desa Pekalongan, Desa Banjaran, Desa Metenggeng, dan Desa Pagedangan yang berada di Kecamatan Bojongsari;
11. Desa Wlahar dan Desa Bantarbarang yang berada di Kecamatan Rembang; dan
12. Desa Karangsari, Desa Pepedan, Desa Rajawana, Desa Tajug, Desa Pekiringan, dan Desa Tamansari yang berada di Kecamatan Karangmoncol.

Kawasan rawan bencana letusan Gunung Api Slamet seluas kurang lebih 8.015 hektar meliputi:

1. Desa Serang, Desa Siwarak, Desa Kutabawa, Desa Karangreja, Desa Tlahab Lor, dan Desa Tlahab Kidul yang berada di Kecamatan Karangreja;
 2. Desa Pengalusan, Desa Binangun, dan Desa Sangkanayu yang berada di Kecamatan Mrebet;
 3. Desa Bumisari dan Desa Metenggeng yang berada di Kecamatan Bojongsari; dan
 4. Desa Karangjengkol, Desa Candinata, Desa Candiwulan, dan Desa Cendana yang berada di Kecamatan Kutasari.
-

Kawasan rawan bencana angin topan seluas kurang lebih 41.532 hektar meliputi:

1. Desa Kedungbenda, Desa Bokol, Desa Majasem, Desa Senon, Desa Pelumutan, dan Desa Jetis yang berada di Kecamatan Kemangkon;
 2. Desa Pagerandong, Desa Sidanegara, Desa Arenan, Desa Sempor Lor, Desa Brecek, dan Desa Cilapar yang berada di Kecamatan Kaligondang;
 3. Desa Karangreja, Desa Candinata, Desa Karangklesem, Desa Karangcegak, Desa Sumingkir, Desa Meri, Desa Kutasari, dan Desa Munjul yang berada di Kecamatan Kutasari;
 5. Desa Pekalongan, Desa Beji, Desa Metenggeng, dan Desa Bumisari yang berada di Kecamatan Bojongsari;
 6. Desa Banjarsari, Desa Tlagayasa, Desa Majapura, Desa Karangduren, Desa Kalapacung, Desa Pakuncen, dan Desa Gunungkarang yang berada di Kecamatan Bobotsari;
 7. Desa Serang, Desa Kutabawa, Desa Karangreja, Desa Siwarak, Desa Tlahab Lor, dan Desa Gondang yang berada di Kecamatan Karangreja;
 8. Desa Sanguwatang, Desa Purbasari, Desa Sirandu, Desa Karangjambu, Desa Jinkang, dan Desa Danasari yang berada di Kecamatan Karangjambu;
 9. Desa Ponjen, Desa Krangean, Desa Langkap, Desa Kalijaran, Desa Brakas, dan Desa Maribaya yang berada di Kecamatan Karanganyar;
 10. Desa Sangkanayu, Desa Pengalusan, dan Desa Cipaku yang berada di Kecamatan Mrebet;
 11. Desa Kejobong, Desa Pangempon, Desa Langgar, Desa Nangkod, dan Desa Kedarpan yang berada di Kecamatan Kejobong;
 12. Desa Tetel, Desa Tumanggal, Desa Bedagas, Desa Larangan, dan Desa Karangjoho yang berada di Kecamatan Pengadegan;
 13. Desa Gunungwuled, Desa Losari, Desa Bantarbarang, Desa Wanogara Wetan, Desa Wlahar, Desa Tanalum, Desa Panusupan, dan Desa Wanogara Kulon yang berada di Kecamatan Rembang;
 14. Desa Kramat, Desa Tunjungmuli, dan Desa Tamansari yang berada di Kecamatan Karangmoncol;
 15. Desa Purbayasa, Desa Bojanegara, dan Kelurahan Karangsantul yang berada di Kecamatan Padamara;
-

16. Desa Bukateja, Desa Bajong, dan Desa Kutawis yang berada di Kecamatan Bukateja; dan
17. Kelurahan Kalikabong, Kelurahan Karangmanyar, Kelurahan Mewek, Desa Selabaya, dan Desa Babakan yang berada di Kecamatan Kalimanah.

i. Kondisi Demografi

Penduduk Kabupaten Purbalingga hasil proyeksi BPS tahun 2014 berjumlah 894.062 jiwa yang terdiri dari 441.706 laki-laki dan 452.356 perempuan, atau tumbuh sebesar 1,06 persen dari tahun sebelumnya. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun laju penduduk Kabupaten Purbalingga mengalami perlambatan pertumbuhan dari 1,36 persen pada tahun 2010 turun secara bertahap menjadi 1,14 persen tahun 2011; 1,11 persen tahun 2012; 1,10 persen tahun 2013 dan 1,06 persen pada tahun 2014. Secara rinci jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2013-2014

No	Kecamatan	2013			2014		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1.	Kemangkon	26.588	27.665	54.253	26.870	27.959	54829
2.	Bukateja	33.654	34.322	67.976	34.014	34.689	68703
3.	Kejobong	21.336	22.612	43.948	21.556	22.848	44404
4.	Pengadegan	17.993	18.577	36.570	18.176	18.765	36941
5.	Kaligondang	27.718	29.885	57.603	28.014	30.207	58221
6.	Purbalingga	28.090	29.663	57.753	28.411	30.000	58411
7.	Kalimanah	25.750	26.426	52.176	26.048	26.735	52783
8.	Padamara	20.276	21.256	41.532	20.526	21.515	42041
9.	Kutasari	28.452	28.726	57.178	28.799	29.075	57874
10.	Bojongsari	29.064	28.740	57.804	29.415	29.088	58503
11.	Mrebet	33.708	34.376	68.084	34.056	34.735	68791
12.	Bobotsari	24.010	24.389	48.399	24.289	24.668	48957
13.	Karangreja	20.377	20.458	40.835	20.577	20.661	41238
14.	Karangjambu	12.303	12.116	24.419	12.431	12.241	24672
15.	Karanganyar	17.562	17.656	35.218	17.721	17.816	35537
16.	Kertanegara	15.290	15.715	31.005	15.422	15.853	31275
17.	Karangmoncol	25.466	25.698	51.164	25.678	25.907	51585
18.	Rembang	29.436	29.330	58.766	29.703	29.594	59297
	Jumlah	437.073	447.610	884.683	441.706	452.356	894.062

Sumber: Purbalingga Dalam Angka, BPS Kabupaten Purbalingga

Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 sebesar 1.150 jiwa/km2, tertinggi di Kecamatan Purbalingga sebesar 3.963

jiwa/km², selanjutnya Padamara 2.436 jiwa/km², dan Kecamatan Kalimanah sebesar 2.434 jiwa/km². Sementara itu kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Karangjambu 571 jiwa/km², selanjutnya Kecamatan Karangreja 839 jiwa/km². *Sex ratio* atau rasio jenis kelamin Kabupaten Purbalingga tahun 2014 tercatat sebesar 97,65 yang artinya diantara 100 penduduk perempuan terdapat kurang lebih 98 penduduk laki-laki atau dengan kata lain penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kepadatan dan *Sex ratio* Penduduk Kabupaten Purbalingga menurut Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel.2.2
Kepadatan Penduduk, Sex Ratio dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Tahun 2012-2014

No	Kecamatan	2013			2014		
		KP	SR	LPK	KP	SR	LPK
1.	Kemangkon	1202	96,11	0,22	1.215	96.11	1.06
2.	Bukateja	1603	98,05	0,28	1.522	98.05	1.07
3.	Kejobong	1099	94,36	0,34	984	94.35	1.04
4.	Pengadegan	876	96,86	0,29	819	96.86	1.01
5.	Kaligondang	1140	92,75	0,32	1.290	92.74	1.07
6.	Purbalingga	3921	94,70	0,18	1294	94.70	1.14
7.	Kalimanah	2319	97,44	0,53	1170	97.43	1.16
8.	Padamara	2292	95,39	0,70	932	95.40	1.23
9.	Kutasari	1502	99,05	0,48	1282	99.05	1.22
10.	Bojongsari	1977	101,13	0,48	1296	101.12	1.21
11.	Mrebet	1530	98,06	0,42	1524	98.05	1.04
12.	Bobotsari	1858	98,45	0,24	1085	98.46	1.15
13.	Karangreja	831	99,60	0,35	914	99.59	0.99
14.	Karangjambu	663	101,54	0,42	547	101.55	1.04
15.	Karanganyar	1176	99,47	0,11	787	99.47	0.91
16.	Kertanegara	1159	97,30	0,17	693	97.28	0.87
17.	Karangmoncol	1121	99,10	0,17	1143	99.12	0.82
18.	Rembang	950	100,36	0,10	1314	100.37	0.90
	Jumlah	1334	97,65	0,32	1150	97.65	1.06

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

- a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi
- Capaian PDRB di Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2010-2014. Kenaikan tersebut terjadi baik kepada capaian PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010. Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Purbalingga telah bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari penurunan peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Purbalingga. Walaupun demikian

kategori Pertanian masih memegang peranan yang cukup besar di Kabupaten Purbalingga, tercatat hingga 2014 peranannya masih bertengger di 30 persen. Peranan terbesar selanjutnya di isi oleh Industri Pengolahan yang berada pada kisaran 23,50 persen. Peranan terendah terjadi pada Pengadaan Listrik dan Gas hingga 2014 hanya memberikan peran sebesar 0,05 persen. Perkembangan peranan/sumbangan sektor PDRB Kabupaten Purbalingga secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2014

Sektor	2012		2013		2014	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.897.421,0	30,96	4.288.657,6	30,55	4.730.399,9	30,00
Pertambangan dan Penggalian	598.817,1	4,71	659.801,8	4,66	805.636,0	5,05
Industri Pengolahan	3.031.830,5	23,87	3.364.117,9	23,74	3.748.176,5	23,50
Pengadaan Listrik dan Gas	6.666,0	0,05	6.980,8	0,05	7.739,0	0,05
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	17.114,8	0,13	17.364,6	0,12	17.822,9	0,11
Konstruksi	720.635,9	5,67	806.235,4	5,69	916.797,3	5,75
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.778.387,0	14,00	1.967.342,3	13,88	2.265.959,7	14,21
Transportasi dan Pergudangan	372.335,3	2,93	404.707,6	2,86	466.545,9	2,93
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	284.256,3	2,24	314.237,2	2,22	343.884,5	2,16
Informasi dan Komunikasi	199.933,1	1,57	234.234,8	1,65	250.427,4	1,57
Jasa Keuangan dan Asuransi	298.556,6	2,35	324.450,1	2,29	357.919,1	2,24
Real Estate	129.680,1	1,02	139.242,2	0,98	156.402,8	0,98
Jasa Perusahaan	17.853,4	0,14	20.653,3	0,15	24.967,5	0,16
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	419.518,9	3,30	441.084,8	3,11	489.698,5	3,07
Jasa Pendidikan	553.295,8	4,36	766.189,7	5,41	878.095,5	5,51
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	110.924,1	0,87	132.930,8	0,94	148.330,0	0,93
Jasa Lainnya	229.300,1	1,81	240.883,0	1,70	284.211,0	1,78

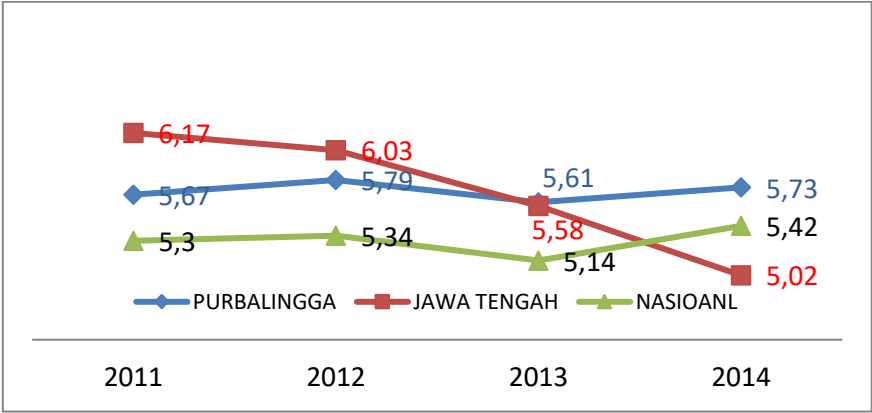
Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2014

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran tingkat perubahan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dihitung menggunakan rumusan pertumbuhan PDRB ADHK atas dasar tahun 2010. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga sebesar 6,63 persen menurun menjadi 5,67 persen pada tahun 2011. Pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 5,79 persen, namun pada tahun 2013 menurun menjadi

5,61persen, dan pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan lagi sebesar 5,73 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 berada pada peringkat ke-3 diantara kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dan pencapaiannya sudah diatas Jawa Tengah yang mencapai pertumbuhan sebesar 5,42 persen. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tersaji dibawah ini:

Gambar 2.2
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Purbalingga Jawa Tengah dan Nasional

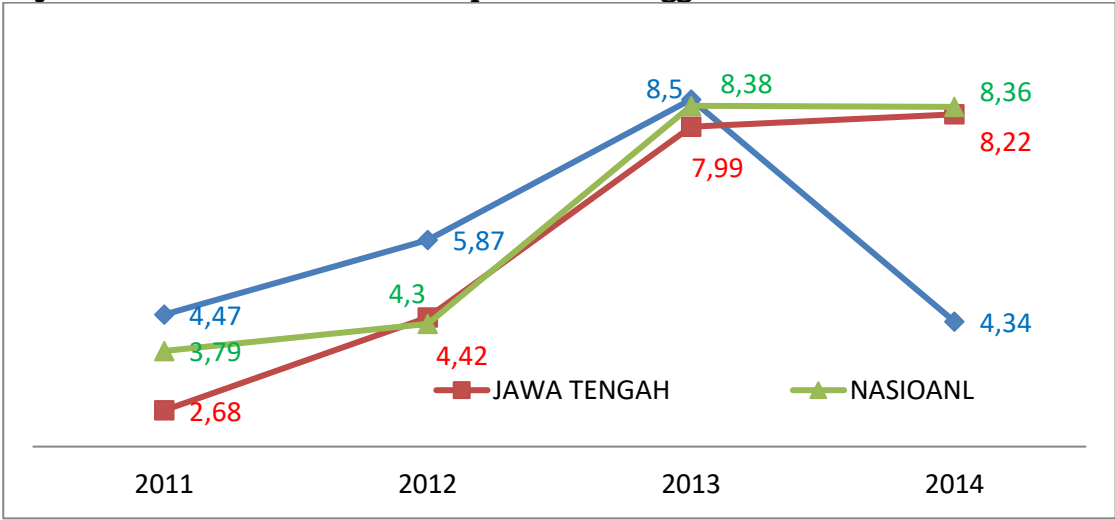


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (PDRB Jateng 2015)

b. Laju inflasi

Perkembangan inflasi tahun kalender setiap tahunnya, tren perubahan yang terjadi di Purbalingga, Jawa Tengah serta nasional menunjukkan pola yang hampir sama. Pada tahun 2014 inflasi Kabupaten Purbalingga berada pada 4,43 persen jauh dibawah nasional dan provinsi yakni 8,36 persen dan 8,22 persen.

Gambar 2.3
Laju Inflasi Tahun Kalender Kabupaten Pubalingga Tahun 2011-2014



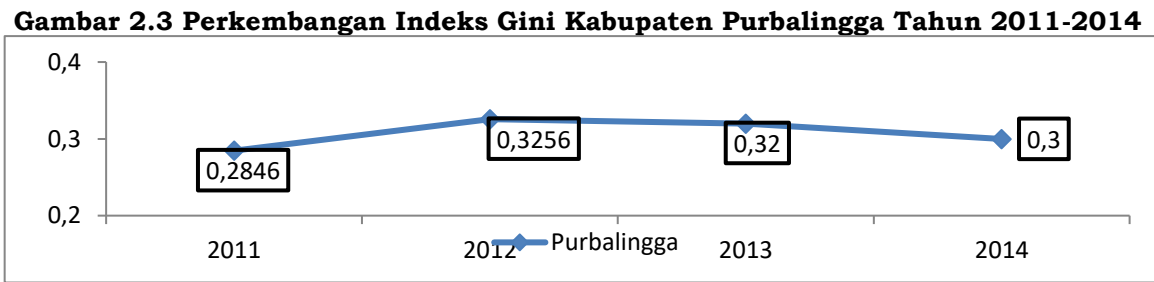
Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2015

c. PDRB Perkapita

PDRB ADHB per kapita Kabupaten Purbalingga pada kurun waktu 2010-2014 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, PDRB per kapita Kabupaten Purbalingga mencapai Rp. 10.858.631,5 meningkat sebesar 12,40 persen menjadi Rp. 12.205.358,9 pada tahun 2011. Pada tahun 2012, kembali terjadi kenaikan capaian PDRB per kapita sebesar 4,06 persen menjadi Rp. 12.700.951,3. Pada tahun 2013 kembali terjadi kenaikan sebesar 11,57 persen menjadi Rp. 14.169.966,6 dan pada tahun 2014 kembali terjadi kenaikan sebesar 12,54 persen menjadi Rp. 15.946.676,6.

d. Indeks Gini

Pada tahun 2014 *Gini Ratio* Kabupaten Purbalingga adalah 0,30 yang artinya ketimpangan cukup rendah atau pemerataan cukup tinggi karena masih dibawah 0,35. Sementara itu *gini ratio* untuk Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 0,38 pada tahun 2014. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Purbalingga secara rinci dapat dilihat pada grafik yang tersaji dibawah ini:



Sumber: BPS Prov Jawa Tengah 2011-2014

e. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Pada tahun 2014, distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Purbalingga tergolong merata pada ketimpangan rendah. Hal tersebut ditunjukkan sebesar 22,57 persen pendapatan dinikmati oleh 40 persen masyarakat berpenghasilan rendah, sebesar 37,11 persen oleh 40 persen masyarakat berpenghasilan menengah dan sebesar 40,32 persen oleh 20 persen masyarakat berpenghasilan tinggi. Data dapat dilihat pada Tabel 2.4

Tabel 2.4

Pemerataan Pendapatan Penduduk Kabupaten Purbalingga
Menurut Kriteria Bank Dunia Tahun 2011-2013

Indikator	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
Kriteria Bank Dunia			
- 40 % rendah	20,60	21,02	22,57
- 40 % sedang	34,12	37,44	37,11
- 20 % tinggi	45,28	41,54	40,32

Sumber : BPS Prov Jawa Tengah 2012-2014

f. Indeks Williamson

Tingkat ketimpangan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Purbalingga (Indeks Williamson) dari tahun 2005 sampai tahun 2008 cenderung mendekati nilai 1. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Purbalingga di tahun-tahun tersebut terus mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2009 s.d. 2013, angka indeks williamson mengalami perbaikan, yang artinya terjadi penurunan kesenjangan antar wilayah dibanding tahun sebelumnya. Dan meningkat lagi di tahun 2014. Kesenjangan antar wilayah akan berdampak terhadap kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah.

Tabel 2.5

**Pemerataan Pendapatan Penduduk Kabupaten Purbalingga
Menurut Kriteria Bank Dunia Tahun 2011-2014**

Tahun	Indeks Williamson
2012	0,45
2013	0,45
2014	0,46

Sumber: data diolah

g. Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2013 sebesar 20,53 persen atau sejumlah 181.100 jiwa, menurun dari tahun 2012 sebesar 21,19 persen atau 181.300 jiwa. Salah satu faktor penyebab bertolak belakangnya presentase penduduk miskin dengan jumlah penduduk miskin dikarenakan berkurangnya jumlah penduduk dan naiknya garis kemiskinan.

Tabel 2.6
Data Kemiskinan Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 – 2014

No	Uraian	2013	2014
1	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	181.100	176.040
2	Persentase Penduduk Miskin	20,53	19,75
3	Garis Kemiskinan (Rp/kp/bln)	265,262	275.022

Sumber : BPS Prov Jawa Tengah (2013-2014).

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga walaupun semakin menurun namun masih tergolong cukup besar. Upaya penanggulangan kemiskinan tentunya perlu ditingkatkan melalui berbagai program yang mengarah pada pemenuhan hak dasar mencakup bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih dan sanitasi serta pangan; perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha; dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Diharapkan dengan adanya program-program yang *pro poor* dapat mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin secara signifikan.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga masih lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah sebesar 14,44 persen dan Nasional sebesar 11,46 persen. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga menempati posisi ke-5 tertinggi di Jawa Tengah setelah Kabupaten Wonosobo (22,08 persen), Kabupaten Kebumen (21,32 persen), Kabupaten Rembang (21,88 persen), dan Kabupaten Brebes (20,82 persen).

h. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purbalingga cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2010-2014. Pada tahun 2010, IPM Kabupaten Purbalingga mencapai 63,61 meningkat menjadi 64,33 pada tahun 2011. Peningkatan juga terjadi pada tahun 2012 dan 2013 dimana masing-masing capaian IPM mencapai 64,94 dan 65,53 serta pada tahun 2014 mencapai 66,23. Perkembangan IPM Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini :

Tabel 2.7 Nilai IPM Kabupaten Purbalingga dan Sekitarnya Tahun 2013-2014

Kabupaten	Nilai IPM	
	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Cilacap	66,80	67,25
Banyumas	68,55	69,25
Purbalingga	65,53	66,23
Banjarnegara	62,84	63,15
Kebumen	64,86	65,67
Jawa Tengah	68,02	68,78

Sumber : BPS Propinsi Jawa Tengah 2014

Nilai IPM Kabupaten Purbalingga tahun 2014 tercatat 66,23. Walaupun nilai ini masih dibawah propinsi Jawa Tengah namun bila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, IPM Kabupaten Purbalingga berada diatas Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen tetapi masih dibawah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap. Demikian juga kondisi tahun 2013, IPM Kabupaten Purbalingga berada pada peringkat 26 masih dibawah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap.

Empat komponen penghitungan IPM adalah angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita. Angka harapan hidup Kabupaten Purbalingga terus mengalami kenaikan dari 72,56 pada tahun 2010 menjadi 72,63 pada tahun 2011, dan terus meningkat lagi hingga menjadi 72,80 pada tahun 2014. Ini memberikan gambaran bahwa ada peningkatan derajat kesehatan di Kabupaten Purbalingga. Begitu juga di bidang pendidikan yang diukur dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Untuk harapan lama sekolah ada peningkatan dari 10,71 pada tahun 2010 menjadi 10,84 pada tahun 2011 dan terus naik pada tahun 2014 menjadi 11,51. Rata-rata lama sekolah untuk penduduk 25 tahun ke atas Kabupaten Purbalingga tahun 2010 adalah 6,22 tahun, naik menjadi 6,68 pada tahun 2013 dan naik lagi menjadi 6,84 pada tahun 2014. Sementara itu besarnya paritas daya beli penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2014 adalah 8.539 ribu rupiah. Perkembangan indikator komposit IPM Kabupaten Purbalingga secara rinci dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini:

Tabel 2.8
Komponen IPM Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2014

Komponen IPM	2013	2014
(1)		
Angka Harapan Hidup (tahun)	72,76	72,80
Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,10	11,51
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	6,68	6,84
Pengeluaran perkapita disesuaikan : 96 komoditas (ribu rupiah PPP)	8.535	8.539

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga 2014

i. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat tingkat partisipasi sekolah penduduk adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka ini dihitung berdasarkan perbandingan antara anak yang sekolah pada tingkat pendidikan tertentu dibagi dengan penduduk umur yang seharusnya anak duduk pada tingkat pendidikan tertentu. APK Kabupaten Purbalingga menurut tingkat pendidikan seperti terlihat pada tabel 2.8

Tabel 2.9 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2014

Tingkat Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)		
	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
SD (7-12 tahun)	108,58	112,53	118,84
SMP (13-15 tahun)	94,61	82,64	89,63
SM (16-18 tahun)	45,63	36,81	52,47

Sumber : Susenas 2012-2014

Pada kurun waktu 3 tahun terakhir, APK SD terus mengalami kenaikan dari 108,58 pada tahun 2012 meningkat menjadi 112,53 pada tahun 2013 dan 118,84 pada tahun 2014. APK SD berada diatas 100 persen yang artinya jumlah penduduk yang sedang bersekolah di tingkat SD lebih besar dibandingkan jumlah penduduk kelompok umur 7-12 tahun. Hal ini disebabkan adanya siswa yang berumur diatas 12 tahun tetapi saat ini masih bersekolah di tingkat SD dikarenakan kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Selain itu, juga adanya siswa yang lebih muda dibanding umur standar yang duduk di suatu jenjang

pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di umur yang lebih muda (kurang dari 7 tahun).

Untuk APK SMP dan SM mengalami penurunan pada tahun 2012-2013 namun dapat kembali meningkat pada tahun 2014. APK SMP yang masih dibawah nilai 100 menunjukkan bahwa pada kelompok umur 13-15 tahun belum keseluruhan penduduknya bersekolah di tingkat SMP. Hal yang sama terjadi juga pada kelompok umur 16-18 tahun yang belum keseluruhan penduduknya bersekolah di tingkat SM (Sekolah Menengah).

Jika dilihat menurut jenis kelamin pada tahun 2014, APK SD dan SMP pada perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi sekolah di SD dan SMP bagi kaum perempuan lebih besar dibanding laki-laki. Sedangkan pada APK SM laki-laki lebih tinggi dari perempuan.

Tabel 2.10 APK Kabupaten Purbalingga Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Laki-laki+Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	117,29	120,54	118,84
SMP	89,21	90,22	89,63
SM	56,27	48.98	52,47

Sumber : Susenas 2014

j. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM Kabupaten Purbalingga tahun 2014 untuk tingkat Sekolah Dasar adalah 97,28; untuk SMP adalah 79,78 dan untuk tingkat SM adalah 44,08. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa untuk APM SD 97,28 menandakan penduduk Kabupaten Purbalingga sudah tepat waktu dalam menyekolahkan anak-anaknya ke SD setelah anak berumur 7 tahun.

Tabel 2.11 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2014

Tingkat Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		
	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	92,13	96,76	97,28
SMP	73,44	74,07	79,78
SM	36,08	34,97	44,08

Sumber : Susenas 2012-2014

Selama kurun waktu 2012-2014, angka partisipasi murni di Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan terutama APM SD dan SLTP. Tabel 2.10 menunjukkan bahwa pada tahun 2012 ada sebanyak 92,13 persen penduduk umur 7-12 tahun yang sedang bersekolah di SD, sedangkan penduduk 13-15 tahun yang sedang bersekolah di SMP sebanyak 73,44 persen. Pada tahun 2013 persentase penduduk umur 7-12 tahun yang sedang sekolah di SD sebanyak 96,76 persen sedangkan penduduk umur 13-15 tahun yang sedang sekolah di SMP sebanyak 74,07 persen. Sementara itu untuk APM SM mengalami penurunan pada tahun 2013 namun kembali meningkat pada tahun 2014 seperti terlihat pada tabel 2.8 di atas.

Tabel 2.12 APM Kabupaten Purbalingga Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Laki-laki+Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	95,45	99,29	97,28
SMP	75,75	85,50	79,78
SM	45,11	43,12	44,08

Sumber : Susenas 2014

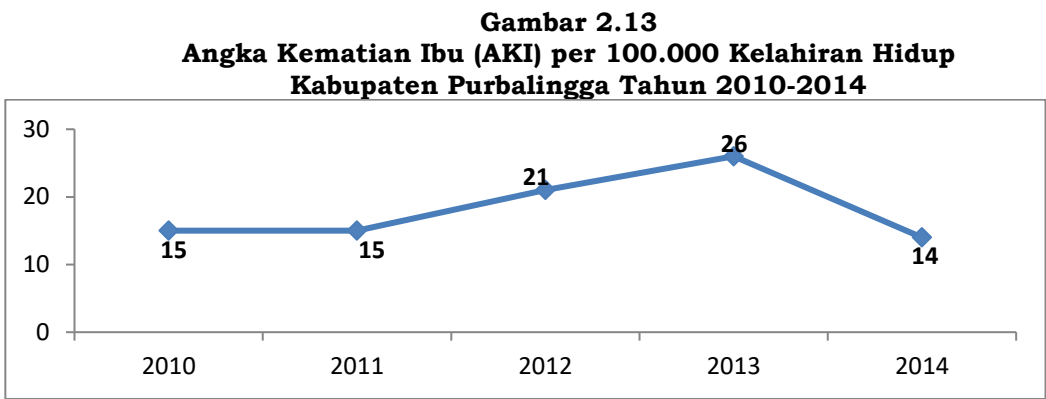
Sama halnya dengan APK, untuk APM SD dan SMP perempuan lebih tinggi dari laki-laki. APM SD perempuan 99,29 menunjukkan bahwa dari seluruh perempuan 7-12 tahun, yang sedang bersekolah di tingkat SD sebanyak 99,29 persen. Sedangkan laki-laki yang berumur 7-12 tahun sebanyak 95,45 persen bersekolah di tingkat SD. APM SMP perempuan 85,50 menunjukkan 85,50 persen dari perempuan umur 13-15 tahun bersekolah di SMP, sementara 75,75 persen laki-laki umur 13-15 tahun bersekolah di SMP.

APM SD pada tahun 2014 sebesar 97,28 persen sementara APK SD pada tahun 2014 sebesar 118,84 artinya terdapat sebesar 21,04 persen anak SD umur kurang dari 7 tahun dan lebih dari 12 tahun yang duduk di bangku Sekolah Dasar.

k. Angka Kematian Ibu (AKI)

Kecenderungan AKI dalam kurun waktu tahun 2010-2014 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun 2013 ke 2014 secara berturut-turut sebesar 26 dan 14 per 100.000 kelahiran hidup (Tahun 2014).

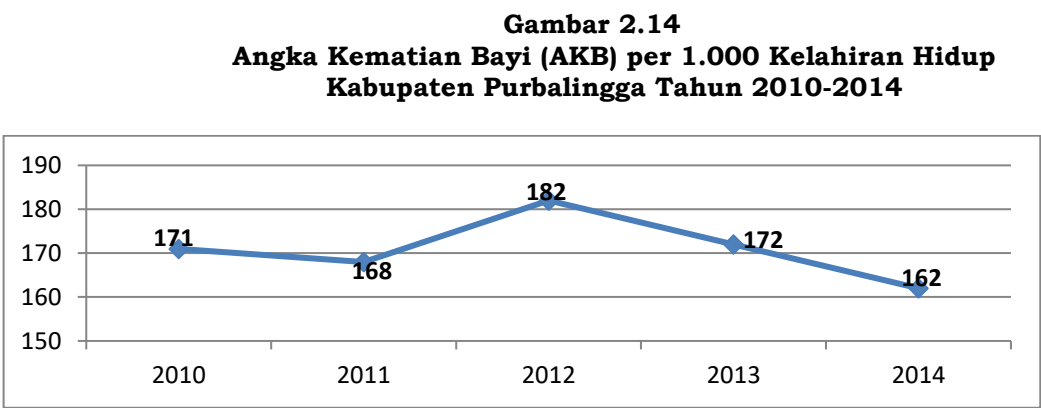
Perkembangan kondisi AKI Kabupaten Purbalingga kurun waktu Tahun 2010-2014 sebagaimana terlihat di Gambar 2.10



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2015

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Perkembangan AKB di Kabupaten Purbalingga selama Tahun 2010-2014 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014, AKB di Kabupaten Purbalingga sebesar 162 kasus per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah tersebut menurun dibandingkan 4 (empat) tahun sebelumnya yaitu tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 secara berturut-turut sebesar 171 kasus, 168 kasus, 182 kasus dan 172 kasus per 1.000 kelahiran hidup. Namun demikian, angka tersebut masih cukup tinggi disebabkan antara lain kehamilan resiko tinggi, kurangnya asupan gizi pada ibu hamil sehingga menyebabkan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), kelainan konginental pada bayi dan kehamilan yang tidak dikehendaki. Kondisi AKB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Gambar 2.11



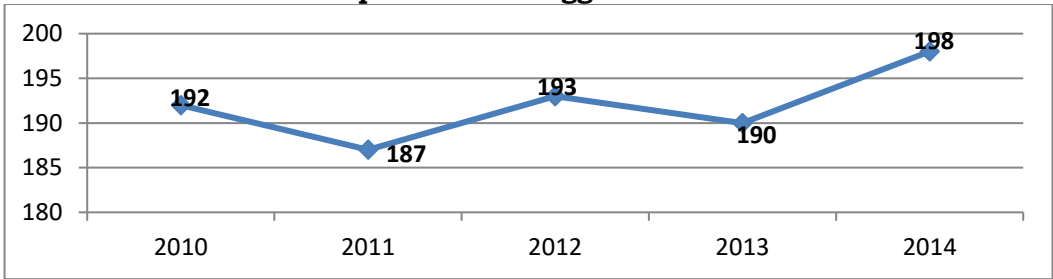
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2015

m. Angka Kematian Balita (AKABA)

AKABA mencerminkan jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka

per 1.000 KH. Capaian AKABA selama tahun 2010-2014 mengalami fluktuatif yaitu sebesar 198 kasus per 1.000 (Tahun 2014). Namun demikian, masih diperlukan perhatian untuk perhatian untuk mengatasi penyebab AKABA antara lain gizi buruk pada balita, kurangnya pemahaman orang tua terkait pentingnya deteksi dini penyakit menular dan tidak menular, serta pentingnya pemberian imunisasi pada balita.

Gambar 2.15
Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup
di Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2014

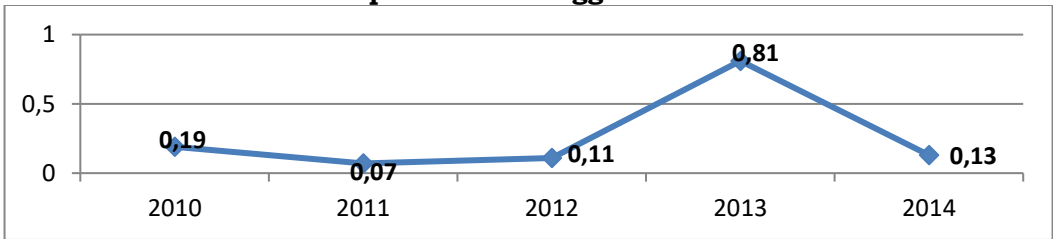


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2015

n. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2010-2014 mengalami fluktuatif, dari 0,19 persen (Tahun 2010), 0,07 persen (Tahun 2011), 0,11 persen (Tahun 2012), naik lagi menjadi 0,81 persen (Tahun 2013), dan mengalami penurunan menjadi 0,13 persen (Tahun 2014). Penurunan tersebut terjadi karena berbagai upaya telah dilakukan diantaranya melalui pemberian makanan tambahan dan perawatan kepada balita gizi buruk. Prevalensi balita gizi buruk Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Gambar 2.13

Gambar 2.16
Prevalensi Balita Gizi Buruk
Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2014



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2015

o. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan dengan angkatan kerja. Data Sakernas 2014 mencatat bahwa tingkat

pengangguran Kabupaten Purbalingga sebesar 5,13 persen yang artinya terdapat sebanyak 5,13 persen penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok penganggur. Menurut Sensus Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), pengangguran mencakup mereka yang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha baru, dan mereka yang tidak mencari pekerjaan karena putus asa sudah berkali-kali mencari pekerjaan namun belum berhasil.

Tabel 2.17 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2014

Jenis Kelamin	Tahun	
	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	6,10	6,82
Perempuan	5,22	2,80
Total	5,72	5,13

Sumber : Sakernas 2012-2013

Data pada tabel 6.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2014 persentase laki-laki yang menganggur lebih banyak dibanding perempuan demikian juga pada tahun 2013. Namun demikian jika dibandingkan dengan tahun 2013 terjadi penurunan pengangguran yang cukup besar pada perempuan yaitu dari 5,22 persen menjadi 2,80 persen pada tahun 2014. Dengan kata lain penurunan tingkat pengangguran pada tahun 2014 lebih dipengaruhi oleh penurunan tingkat pengangguran perempuan seiring dengan menurunnya penduduk usia kerja perempuan yang mencari pekerjaan.

p. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan jumlah angkatan kerja yaitu jumlah penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan terhadap jumlah seluruh penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). TPAK Kabupaten Purbalingga tahun 2014 tercatat sebesar 70,95 persen yang mengindikasikan bahwa terdapat 70,95 persen penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Purbalingga. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014.

Tabel 2.18 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2014

Jenis Kelamin	Tahun	
	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	85,69	84,18
Perempuan	62,40	58,36
Total	73,76	70,95

Sumber : Sakernas 2013-2014

Bila dibandingkan dengan tahun 2013, TPAK Kabupaten Purbalingga tahun 2014 mengalami penurunan sejalan dengan menurunnya persentase penduduk usia kerja yang bekerja yaitu dari 73,76 pada tahun 2013 menjadi 70,95 pada tahun 2014. Jika diamati lebih teliti, maka penurunan TPAK ini lebih banyak terjadi pada tenaga kerja perempuan kurang lebih 4 persen yaitu dari 62,40 menjadi 58,36; sementara TPAK laki-laki hanya turun kurang lebih 1 persen.

q. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Perkembangan capaian IPG Kabupaten Purbalingga pada kurun waktu 2008-2012 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian IPG Kabupaten Purbalingga pada tahun 2009 adalah 61,64 meningkat sebesar 0,84 pada tahun 2010 menjadi 62,48. Pada tahun 2011, IPG kembali mengalami kenaikan menjadi 62,89 dan kembali mengalami kondisi yang sama pada tahun 2012 yaitu menjadi 63,43.

r. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG Kabupaten Purbalingga mengalami perkembangan yang fluktuatif dalam kurun waktu 2009-2012. Pada tahun 2009 capaian IDG Kabupaten Purbalingga mencapai 63,98 meningkat tajam hingga menjadi 67,47 pada tahun 2011 namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 61,74 atau lebih rendah dari capaian tahun 2009.

Salah satu yang paling mempengaruhi turunnya IDG Kabupaten Purbalingga adalah semakin menurunnya keterlibatan perempuan dalam parlemen yang pada tahun 2012 hanya sebesar 20 persen dari total seluruh anggota DPRD yang ada. Perkembangan indikator komposit

IDG Kabupaten Purbalingga secara rinci dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini:

Tabel 2.19
Capaian Indikator Komposit IDG Kabupaten Purbalingga

No	Indikator Komposit	2009	2010	2011	2012
1	Keterlibatan perempuan dalam parlemen	14,81	24,00	32,00	20,00
2	Perempuan sebagai tenaga manager, professional, administrasi, dan teknisi,	49,26	46,15	41,22	39,80
3	Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	41,72	41,21	40,62	41,09

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013

B. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2013-2014

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermartabat. Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kompetensi masyarakat terutama kemampuan memecahkan masalah.

a. Pendidikan Dasar

1). Angka Partisipasi Sekolah

Capaian Angka Partisipasi Sekolah tahun 2011-2014 pada jenjang SD/MI selalu meningkat, dari 97,69 (Tahun 2011) menjadi 100,00 (Tahun 2014). Pada jenjang SMP/MTs, Angka Partisipasi Sekolah 84,76 (Tahun 2011) menjadi 94,27 (Tahun 2014). Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Purbalingga sebagaimana Tabel 2.16

Tabel 2.20
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah
Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2014

No	Jenjang Pendidikan	APS	
		2013	2014
1	SD/MI (7-12 th)	98,67	100,00
2	SMP/MTs (13-15 th)	85,65	94,27

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2015

2). Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah

Rasio Ketersediaan sekolah/ penduduk adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan sejauhmana ketersediaan sekolah dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah.

Pada kurun waktu 2011-2012 dan sejalannya dengan upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), ketersediaan sekolah pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) mengalami peningkatan. Pada jenjang SD/MI dari 646 unit menjadi 647 unit, namun pada Tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 644 unit untuk SD/MI dan 111 unit untuk SMP/MTs. Perkembangan pada tahun 2010-2014, sebagaimana Tabel 2.21

Tabel 2.21
Perbandingan Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah
Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2014

No	Uraian	Tahun	
		2013	2014
1	Jumlah SD/MI	647	644
2	Jumlah SMP/MTs	113	111
3	Jumlah penduduk usia 7 s.d 12 th	99.105	89.560
4	Jumlah penduduk usia 13 s.d 15 th	53.222	55.752

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2015 (diolah)

Berdasarkan data rasio ketersediaan sekolah SD/MI per 10.000 penduduk usia 7-12 tahun, pada kurun waktu tahun 2013-2014, rasio tersebut mengalami peningkatan dari 65,28 menjadi 71,91. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rasio ketersediaan SD/MI di Kabupaten Purbalingga cukup memadai. Untuk SMP/MTs, dalam kurun waktu 2012-2014 mengalami penurunan menjadi 19,91 dan kondisi tersebut belum memadai, dikarenakan rasio ideal adalah 52,08. Data rasio ketersediaan sekolah selengkapnya tertuang dalam Tabel 2.22

Tabel 2.22
Rasio Ketersediaan Sekolah
Terhadap 10.000 Jumlah Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2014

No	Uraian	Tahun	
		2013	2014
1	Rasio SD/MI per 10.000 penduduk Usia 7-12 tahun	65,28	71,91
2	Rasio SMP/MTs per 10.000 penduduk Usia 13-15 tahun	21,23	19,91

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2015 (diolah)

3). Rasio Guru terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru per 10.000 jumlah murid berdasarkan jenjang pendidikan tertentu. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan jumlah pendidik dan jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai proses pembelajaran yang berkualitas.

Pada periode waktu tahun 2013-2014, rasio guru terhadap murid SD/MI di Kabupaten Purbalingga meningkat dari 15,49 menjadi 18,54, yang menggambarkan ketersediaan guru belum memenuhi kondisi ideal. Kondisi berbeda pada jenjang SMP/MTs, yaitu rasio menurun dari 21,89 pada tahun 2013 menjadi 19,68 pada tahun 2014. Perkembangan rasio guru dan murid di Kabupaten Purbalingga selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.23

Tabel 2.23
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2014

Jenjang Pendidikan		2013	2014
I SD/MI			
	Jumlah guru	6.555	6.410
	Jumlah murid	101.516	118.831
	Rasio	15,49	18,54
II SMP/MTs			
	Jumlah guru	2.035	2.292
	Jumlah murid	44.546	45.112
	Rasio	21,89	19,68

Sumber: BPS Kabuoaten Purbalingga, 2015 (diolah)

b. Pendidikan Menengah

1). Angka Partisipasi Sekolah

Capaian Angka Partisipasi Sekolah pendidikan menengah di Kabupaten Purbalingga bersifat fluktuatif, dari

tahun 2012 sebesar 49,3653,74 turun menjadi 41,8 pada tahun 2013 dan kembali naik pada tahun 2014 menjadi 52,28. Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah pendidikan menengah antara lain disebabkan belum memadainya jmlah SMA/SMK/MA di beberapa wilayah kecamatan dan rendahnya tingkat perekonomian masyarakat (sehingga lulusan SMP/MTs sudah harus bekerja).

- 2). Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah
- Rasio ketersediaan sekolah/penduduk menunjukkan jumlah SMA/SMK/MA per 10.000 penduduk usia sekolah menengah. Rasio ini mengindikasikan sejauhmana ketersediaan SMA/SMK/MA mampu menampung seluruh penduduk usia sekolah menengah.

Pada kurun waktu 2010-2014, jumlah SMA/SMK/MA meningkat dari 49 unit menjadi 53 unit, dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun sebanyak 40.066 orang. Berdasarkan data tersebut, rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan menengah pada tahun 2012-2013 mengalami penurunan dari 14,17 menjadi 11,63, namun pada tahun 2014 meningkat menjadi 13,23. Kondisi tersebut sebagaimana Tabel 2.24

Tabel 2.24
Rasio Ketersediaan Sekolah SMA/SMK/MA
Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2014

Uraian	Tahun	
	2013	2014
Jumlah SMA/ SMK/ MA	53	53
Jumlah penduduk	45.561	40.066
Rasio SMA/SMK/MA per 10.000 penduduk usia 16-18 tahun	11,63	13,23

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2015 (diolah)

- 3). Rasio Guru terhadap Murid
- Pada Tahun 2013-2014 rasio guru terhadap murid menurun dari 16,52 pada tahun 2013 menjadi 15,46 pada tahun 2014. Meskipun demikian rasio tersebut tetap menunjukkan kondisi ketersediaan guru terhadap murid cukup memadai. Permasalahannya adalah belum terwujudnya distribusi guru khususnya antara wilayah
-

perkotaan dan pedesaan. Rasio guru terhadap murid dalam kurun waktu tahun 2010-2014 sebagaimana Tabel 2.25

Tabel 2.25
Rasio Guru Terhadap Murid SMA/SMK/MA
Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2014

Uraian	Tahun	
	2013	2014
Jumlah Guru	1.513	1.699
Jumlah Murid	24.997	26.272
Rasio	16,52	15,46

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2015 (diolah)

c. Pendidikan Anak Usia Dini

Keberhasilan kinerja program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diukur melalui Indikator Angka Partisipasi Kasar. APK PAUD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 – 2014 fluktuatif, namun cenderung meningkat. Pada tahun 2010 capaian APK PAUD sebesar 42,71 persen, pada tahun 2013 APK PAUD mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2012. Pada tahun 2014 APK PAUD mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 menjadi sebesar 52,81 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja lembaga PAUD dan juga tingkat kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di PAUD.

d. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB) dan menengah (SMA/SMK/MA) pada tahun 2010-2014 fluktuatif. Pada SD/MI/SDLB, dari 0,15 (Tahun 2010) menjadi 0,24 (Tahun 2014); SMP/MTs/SMPLB, dari 1,02 (Tahun 2010) menjadi 0,70 (Tahun 2014); dan SMA/SMK/MA, dari 0,72 (Tahun 2010) menjadi 0,96 (Tahun 2014). Selengkapny kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel 2.26

Tabel 2.26
Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2014

No	Jenjang	Tahun	
		2013	2014
1	SD/MI/SDLB	0,65	0,24
2	SMP/MTs/SMPLB	0,29	0,70
3	SMA/SMK/MA	0,29	0,96

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, 2015

e. Angka Kelulusan

Angka kelulusan menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Capaian Angka Kelulusan pada tahun 2013-2014 mengalami peningkatan. Angka kelulusan pada tahun 2010-2014 sebagaimana Tabel 2.27

Tabel 2.27
Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2014

No	Jenjang	Tahun	
		2013	2014
1	SD/MI/SDLB	99,61	99,91
2	SMP/MTs/SMPLB	99,48	99,96
3	SMA/SMK/MA	99,52	99,90

2. Kesehatan

a. Angka Kesakitan

Hasil Susenas 2014 menunjukkan bahwa sebanyak 32,62 persen penduduk di Kabupaten Purbalingga telah mengalami keluhan kesehatan mulai dari panas, batuk, pilek, sakit kepala berulang, sakit gigi, dan lain-lain. Ini berarti bahwa pada satu bulan sebelum pencacahan ada sebanyak 32,62 persen penduduk Kabupaten Purbalingga mengalami gangguan kesehatan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi kesehatan masyarakat sedikit mengalami penurunan dilihat dari angka kesakitan tahun 2013 yaitu 31,42 persen.

Tabel 2.28 Angka Kesakitan Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 dan 2014

Tahun	Jenis Kelamin		Laki-laki+ Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	31,82	31,02	31,42
2014	32,18	33,04	32,62

Sumber : Susenas 2013-2014

Jika dilihat menurut jenis kelamin pada tahun 2014, laki-laki dan perempuan yang mengalami keluhan kesehatan tidak terlalu jauh berbeda yaitu laki-laki 32,18 persen dan perempuan 33,04 persen. Perempuan sedikit lebih rentan terhadap penyakit dibandingkan laki-laki.

Kondisi yang cukup berbeda terjadi pada tahun 2013 dimana laki-laki yang mengalami keluhan kesehatan lebih banyak dibandingkan kaum perempuan yaitu laki-laki 31,82 persen sementara perempuan 31,02 persen. Namun secara umum kondisi ini sedikit lebih baik disbanding tahun 2014.

Pada tabel 2.29 di bawah ini dapat dilihat bahwa keluhan yang sering dialami oleh penduduk adalah batuk, pilek, panas dan sakit kepala berulang. Kaum perempuan lebih cenderung mengeluh sakit kepala berulang dengan melihat persentase keluhannya yang paling tinggi dibanding penyakit yang lain yaitu 15,71 persen pada tahun 2013 dan 9,98 pada tahun 2014 meskipun secara persentase menurun dalam 2 tahun terakhir. Sementara kaum laki-laki lebih cenderung mengalami keluhan batuk dan pilek yaitu sebanyak 21,43 persen pada tahun 2013 dan 18,70 persen pada tahun 2014.

Disamping itu keluhan kesehatan Lainnya yang perlu mendapatkan perhatian adalah keluhan kesehatan karena penyakit lain seperti campak, telinga berair/congek, sakit kuning/liver, kejang-kejang, lumpuh, pikun, termasuk juga gangguan kesehatan akibat hal lainnya seperti kecelakaan/musibah, bencana alam, tidak nafsu makan, sulitbuang air besar, sakit kepala karena demam, dan lain lain. Jenis keluhan kesehatan Lainnya, terjadi kenaikan yang cukup berarti yaitu dari 53,99 persen pada tahun 2013menjadi 61,09 persen pada tahun 2014 atau naik sekitar 7,10 persen.

Tabel 2.29 Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Keluhan dan Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2014

JENIS KELUHAN	2013			2014		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Panas	7,80	5,41	6,61	7,89	4,25	6,10
2. Batuk	8,60	8,44	8,52	9,17	5,16	7,20
3. Pilek	12,83	9,99	11,42	9,53	8,98	9,26
4. Asma/Nafas sesak	3,83	1,32	2,59	2,54	0,43	1,51
5. Diare	2,78	2,09	2,44	3,23	1,84	2,54
6. Sakit Kepala Berulang	7,04	15,71	11,34	6,55	9,98	8,23
7. Sakit gigi	2,29	3,90	3,09	4,63	3,49	4,07

JENIS KELUHAN	2013			2014		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
8. Lainnya	54,83	53,14	53,99	56,46	65,87	61,09
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2013-2014

b. Lamanya Sakit

Untuk melihat tingkat intensitas penyakit yang diderita penduduk, maka dapat dilihat dari lamanya hari sakit. Tabel 2.30 menunjukkan distribusi penduduk yang sakit yaitu yang mempunyai keluhan kesehatan sampai mengakibatkan pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari terganggu selama sebulan yang lalu menurut lamanya hari sakit.

Tabel 2.30 Persentase Penduduk Yang Menderita Sakit Sebulan yang Lalu Menurut Lamanya Sakit dan Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga Tahun 2014

Lamanya Sakit (Hari)	Jenis Kelamin		Laki-laki+Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
< 4	91,49	91,43	91,46
4 - 7	5,48	6,42	5,96
8 - 14	1,09	1,08	1,09
15 - 21	0,57	0,14	0,35
22 - 30	1,37	0,93	1,14
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2014

Pada tabel tersebut dapat terlihat bahwa sebanyak 91,46 persen penduduk menderita sakit hanya berkisar dibawah 4 hari. Hal ini dikarenakan penyakit yang diderita adalah penyakit ringan (infeksi) seperti batuk, pilek dan sakit kepala. Namun demikian, permasalahan sanitasi lingkungan dan beberapa penyakit degeneratif lainnya tetap harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

Secara umum rata-rata lama sakit penduduk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 adalah 3,14 hari dengan rincian laki-laki 3,38 hari dan perempuan 2,90 hari. Walaupun angka kesakitan perempuan lebih tinggi namun lamanya sakit bagi perempuan lebih pendek dibanding laki-laki.Hal ini dimungkinkan kaum perempuan lebih cepat sembuh atau tetap beraktivitas

meskipun belum pulih sepenuhnya dari sakit. Dibandingkan tahun 2013 rata-rata lama sakit mengalami kenaikan dari 2,63 hari menjadi 3,14 hari.

c. Pemanfaatan Fasilitas dan Sarana Kesehatan

Data Susenas 2014 menunjukkan bahwa sebanyak 51,84 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan pernah mengobati sendiri penyakitnya baik dengan pengobatan tradisional, modern, maupun lainnya. Sementara itu jika dirinci menurut jenis kelamin, ada sedikit perbedaan dimana penduduk perempuan yang mengobati sendiri penyakitnya sebanyak 51,69 persen sedangkan laki-laki lebih banyak yaitu 51,99 persen.

Dari seluruh penduduk yang pernah mengobati sendiri penyakitnya, sebagian besar yaitu 88,15 persen penduduk memilih menggunakan obat modern untuk mengatasi keluhan kesehatannya. Sementara itu penduduk yang memilih menggunakan obat tradisional sebanyak 6,05 persen dan yang menggunakan obat modern dan tradisional 4,55 persen. Pemilihan obat modern dianggap lebih baik khasiatnya dibanding obat tradisional. Selain itu juga tidak terlalu ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang mengobati sendiri penyakitnya dalam pemilihan jenis obat digunakan.

Tabel 2.31 Persentase Penduduk Yang Berobat Sendiri Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Obat Yang Digunakan Kabupaten Purbalingga Tahun 2014

Jenis Obat Yang Digunakan	Jenis Kelamin		Laki-laki+ Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Modern	87,20	89,06	88,15
2. Tradisional	4,99	7,08	6,05
3. Lainnya	0,40	0,88	0,66
4. Modern dan Tradisional	6,52	2,67	4,55
5. Modern dan Lainnya	0,89	0,31	0,59
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2013

Salah satu indikator lain pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kesehatan adalah banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan ke fasilitas

kesehatan. Berdasarkan Susenas 2014 penduduk Kabupaten Purbalingga yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan ke fasilitas kesehatan tercatat sebanyak 53,70 persen dengan rincian laki-laki 50,25 persen dan perempuan 56,97 persen. Kenyataannya perempuan lebih cenderung untuk berobat ke pelayanan kesehatan dibanding laki-laki.

Tabel 2.32 memperlihatkan bahwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan (tempat pengobatan) yang banyak dikunjungi penduduk adalah tenaga kesehatan medis seperti praktek dokter/poliklinik (22,30 persen), puskesmas/pustu (27,16 persen) dan praktek tenaga kesehatan (41,08 persen). Untuk pengobatan non medis seperti praktek pengobatan tradisional, dukun bersalin dan lainnya persentasenya sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran penduduk akan pengobatan pada tenaga medis sudah cukup baik.

Tabel 2.32 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat Jalan dan Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga Tahun 2014

Tempat Berobat Jalan	Jenis Kelamin		Laki-laki+ Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah Sakit Pemerintah	4,08	3,39	3,70
Rumah Sakit Swasta	4,54	2,81	3,59
Praktek Dokter/Poliklinik	23,85	21,03	22,30
Puskesmas/Pustu	24,16	29,65	27,16
Praktek Nakes	41,14	41,03	41,08
Praktek Batra	1,08	0,73	0,89
Dukun Bersalin	0,00	0,00	0,00
Lainnya	1,15	1,36	1,28
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2014

d. Penolong Kelahiran Terakhir

Persentase balita yang proses kelahirannya ditolong oleh bidan sebesar 74,86 persen, ditolong dokter 15,58 persen dan yang ditolong oleh dukun hanya 9,56 persen. Hal yang cukup menarik adalah untuk bayi perempuan yang persalinannya ditolong oleh tenaga dukun bayi persentasenya lebih tinggi dibandingkan bayi laki-laki. Namun secara umum masyarakat

lebih cenderung memilih tenaga medis dalam proses penolong kelahiran. Kondisi ini dapat menunjukkan bahwa tingkat kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Purbalingga selama tahun 2014 sudah cukup baik.

Tabel 2.33 Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir dan Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga Tahun 2014

Penolong Kelahiran Terakhir	Jenis Kelamin		Laki-laki+ Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Dokter	14,28	16,75	15,58
Bidan	78,96	71,18	74,86
Dukun	6,76	12,07	9,56
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2014

Tenaga kesehatan bidan cenderung lebih banyak dikunjungi dikarenakan bidan praktek maupun bidan desa aksesnya mudah, selain dekat dan bisa kapan saja, disamping itu biayanya pun dapat terjangkau oleh sebagian besar masyarakat. Masih adanya masyarakat yang menggunakan tenaga dukun dalam menolong proses kelahiran dimungkinkan terjadi di daerah pedesaan yang tingkat pengetahuan kesehatannya masih rendah dan masih percaya dengan tenaga dukun.

e. Pemberian Air Susu Ibu (ASI)

Selain penolong kelahiran, pemberian air susu ibu (ASI) sangat berpengaruh terhadap kesehatan anak. Pola dan lama pemberian ASI memberikan pengaruh yang sangat positif pada kondisi kesehatan dan proses tumbuh kembang anak balita secara optimal. Pemberian ASI di Kabupaten Purbalingga sudah cukup baik. Menurut data Susenas 2014, persentase balita 0-4 tahun yang pernah diberi ASI sebanyak 96,41 persen dari seluruh balita di Kabupaten Purbalingga dengan rincian balita laki-laki 94,98 persen dan balita perempuan 97,70 persen.

Pemberian ASI dianjurkan oleh para ahli kesehatan karena dipercaya mempunyai manfaat yang sangat besar baik bagi ibu maupun untuk kesehatan bayi. Balita 0-4 tahun yang diberi ASI selama lebih dari 24 bulan sebanyak 31,77 persen dimana untuk

balita laki-laki 32,39 persen dan balita perempuan 31,22 persen. Secara umum balita laki-laki lebih lama disusui hingga lebih dari 2 tahun.

Tabel 2.34 Persentase Balita (0-4 tahun) yang Pernah Diberi ASI Menurut Lamanya Pemberian ASI dan Jenis Kelamin Kab. Purbalingga Tahun 2014

Lama Pemberian ASI (bulan)	Jenis Kelamin		Laki- laki+Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 5	13,14	12,42	12,75
6 - 11	14,16	16,48	15,40
12 - 17	16,40	18,45	17,49
18 - 23	23,91	21,43	22,59
24 +	32,39	31,22	31,77
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2014

Sementara itu pemberian ASI untuk balita 2-4 tahun sebagian besar sudah lebih dari 24 bulan yaitu 52,01 persen dengan persentase balita laki-laki lebih tinggi dari balita perempuan. Secara umum rata-rata lama pemberian ASI balita 2-4 tahun di Kabupaten Purbalingga adalah 21,67 bulan dengan perbandingan balita laki-laki 22,03 bulan dan balita perempuan 21,36 bulan.

Tabel 2.35 Persentase Balita (2-4 tahun) yang Pernah Diberi ASI Menurut Lamanya Pemberian ASI dan Jenis Kelamin Kab. Purbalingga Tahun 2014

Lama Pemberian ASI (bulan)	Jenis Kelamin		Laki- laki+Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 5	2,51	4,05	3,34
6 - 11	6,53	8,76	7,74
12 - 17	11,26	8,75	9,90
18 - 23	25,89	27,96	27,01
24 +	53,81	50,48	52,01
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2014

f. Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2014 mengalami kenaikan dengan demikian beban pelayanan

puskesmas semakin berat dan berpengaruh pada kualitas pelayanan. Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk setiap tahunnya belum memenuhi standar Kementrian Kesehatan RI yaitu satu Puskesmas melayani 30.000 penduduk. Data selengkapnya sebagaimana Tabel 2.36

Tabel 2.36
Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk
Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2014

Tahun	Jumlah Puskesmas (unit)	Jumlah Penduduk (orang)	Rasio
2013	48	884.683	1 : 18.431
2014	48	894.062	1 : 18.626

Sumber: Purbalingga Dalam Angka, 2015

g. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Dalam kurun waktu 2011-2014 rasio dokter gigi per satuan penduduk di Kabupaten Purbalingga lebih kecil dibandingkan doktor spesialis dan dokter umum per satuan penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa dokter gigi paling sedikit dibandingkan dokter umum dan dokter spesialais per satuan penduduk. Disamping itu rasio dokter umum, spesialis, dan gigi cenderung mengalami peningkatan, namun demikian keberadaan dokter tersebut masih perlu ditingkatkan guna meningkatkan cakupan pelayanan kepada masyarakat. Data perkembangan rasio dokter dapat dilihat pada Tabel 2.37

Tabel 2.37
Perkembangan Rasio Dokter
Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2014

Tahun	Dokter Umum		Dokter Spesialis		Dokter Gigi	
	Jumlah	Ratio	Jumlah	Ratio	Jumlah	Ratio
2013	55	0,06	57	0,06	7	0,01
2014	45	0,05	60	0,07	5	0,01

Sumber: Purbalingga Dalam Angka, 2015

h. Rasio Tenaga Paramedis per Satuan Penduduk

Keberadaan tenaga paramedis sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat. Rasio tenaga paramedis di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2011-2014 cenderung meningkat. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.38

Tabel 2.38
Perkembangan Rasio Tenaga Paramedis
Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2014

Tahun	Perawat		Bidan		Tenaga Farmasi		Tenaga Gizi	
	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
2013	427	0,48	71	0,08	16	0,02	38	0,04
2014	484	0,54	93	0,10	40	0,04	33	0,04

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2015 (diolah)

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Pekerjaan Umum

Urusan pekerjaan umum merupakan salah satu urusan yang menangani pemenuhan infrastruktur dasar pada suatu daerah. Pelayanan urusan pekerjaan umum difokuskan pada pelayanan urusan Jalan dan Jembatan, Drainase, persampahan. Secara umum kondisi pelayanan urusan pekerjaan umum di Kabupaten Purbalingga masih dalam kondisi yang kurang baik. Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja indikator yang cukup rendah. Capaian fokus pelayanan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang diuraikan sebagai berikut.

1). Jembatan dan Jalan

Jalan merupakan salah satu infrastruktur penting di Kabupaten Purbalingga yang perlu mendapat perhatian. Kondisi jalan baik di Kabupaten Purbalingga tiap tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2010 Persentase panjang jalan dengan lebar $\geq 6,00$ m mencapai 39,91 dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 63,11 persen. Kondisi panjang jalan di Kabupaten Purbalingga tahun 2010 - 2014 sudah mencapai 710.204 m. Persentase jalan kondisi baik menunjukkan peningkatan dari sebesar 64,21 persen pada tahun 2010 menjadi sebesar 86,57 persen pada tahun 2014. Kerusakan jalan di Kabupaten Purbalingga antara lain disebabkan kondisi tanah di Kabupaten Purbalingga yang cenderung labil. Selain itu kerusakan jalan juga dipengaruhi oleh tonase kendaraan yang seringkali melebihi kapasitas jalan, sehingga mempercepat kerusakan jalan.

2). Drainase

Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota (perencanaan infrastruktur khususnya). Drainase adalah salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Prasarana drainase berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air permukaan dan bawah permukaan tanah) dan atau bangunan resapan.

Drainase di Kabupaten Purbalingga juga perlu mendapatkan perhatian dimana kondisi drainase baik baru mencapai 20 persen ditahun 2012 dan meningkat menjadi 45,45 persen pada tahun 2014. Kondisi ini menunjukan banyak saluran drainase dalam kondisi rusak dan tidak berfungsi. Kerusakan drainase ini perlu segera ditangani karena drainase berfungsi sebagai pengendali air permukaan. Drainase yang tersumbat dapat menyebabkan genangan air dan kerusakan jalan serta bangunan yang ada. Pentingnya peningkatan kualitas saluran drainase salah satunya untuk mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi bencana banjir.

3). Sumberdaya Air

Potensi sumberdaya air di Kabupaten Purbalingga cukup baik untuk mendukung penyediaan kebutuhan air baik untuk irigasi maupun untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Capaian kinerja untuk indikator rasio jaringan irigasi selama 3 tahun terakhir 2010-2013 tidak mengalami perubahan/peningkatan yaitu 17,2 m/ha sedangkan panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik mencapai 32,21 persen pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 53,1 persen pada tahun 2012, dan menurun menjadi hanya sebesar 38,1 persen pada tahun 2013. Selanjutnya dilihat dari ketersediaannya air irigasi untuk pertanian mengalami peningkatan, pada tahun 2010

ketersediaan air irigasi untuk pertanian mencapai angka 62 persen, dan pada tahun 2014 mencapai sebesar 70 persen.

4). Penataan Ruang

Kinerja Penataan ruang menunjukkan capaian yang baik, terlihat dari semua kawasan perkotaan telah memiliki RDTRK. Tingkat penyimpangan pemanfaatan ruang di Kabupaten Purbalingga nol, artinya tidak terjadi penyimpangan dalam pemanfaatan ruang. Namun demikian, masih banyak bangunan yang belum memiliki Ijin mendirikan bangunan (IMB). Tentunya kedepan perlu ditingkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dengan optimalisasi perijinan IMB.

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 – 2014

No	Indikator	Satuan		
			2013	2014*
	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.			
1.	Panjang jalan	km	710,204	710,204
2.	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang	%	80,70	
	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong			
1.	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	%	45,45	45,45
2	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	10,02	10,56
	Program pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan lainnya.			
1.	Rasio Jaringan Irigasi	m/ha	17,2	17,2
2.	Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	36,6	38,1
3.	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	%	68	70
	Program Penataan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah.			
1.	Jumlah Perda rencana detail tata ruang kawasan (RDTRK) perkotaan yang masih berlaku	dok	2	2
2.	Jumlah kawasan perkotaan yang belum memiliki RDTRK	dok	0	0
3.	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan serta	dok	tersedia	tersedia

No	Indikator	Satuan		
			2013	2014*
	digital			
4.	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan			
5.	Tingkat penyimpangan pemanfaatan ruang	%	0	0

Keterangan: *) angka sementara
 Sumber Data : DPU Kabupaten Purbalingga

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja pembangunan perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat dari beberapa indikator seperti Luas kawasan kumuh, Persentase rumah tidak layak huni; Persentase rumah tangga bersanitasi; Persentase rumah tangga menggunakan air bersih. Secara umum dalam kurun waktu tahun 2010-2013 penataan lingkungan permukiman perlu ditingkatkan. Walaupun di Kabupaten Purbalingga tidak terdapat kawasan kumuh, namun jumlah rumah tidak layak huni masih banyak, yaitu sejumlah 13.814 unit (4,7%). Cakupan sanitasi dan air bersih sudah baik dengan capaian lebih dari 70% pada tahun 2013. Walaupun demikian kedepan perlu ditingkatkan agar akses masyarakat terhadap air bersih dan sarana sanitasi semakin baik.

Tabel 2.40
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 – 2014

No	Indikator	Satuan		
			2013	2014
1	Luas kawasan kumuh	ha	N/A	32,39
2	Jumlah rumah tidak layak huni	unit	N/A	27.533
3	Persentase rumah tidak layak huni	%	N/A	11,7%
4	Persentase rumah tangga bersanitasi	%		74,89
5	Persentase rumah tangga menggunakan air bersih	%		98,48

Sumber Data : DPU Kabupaten Purbalingga

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penegakkan hukum terhadap pelanggaran Perda Kebersihan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Purbalingga dalam jangka waktu 2010-2014 mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat dari tingkat penyelesaian pelanggaran Perda Kebersihan, Ketentraman dan Ketertiban pada tahun 2011 sebesar 60 persen merupakan yang

tertinggi sementara tahun 2013 merupakan yang terendah dengan 41 persen. Sementara angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Purbalingga juga mengalami fluktuasi, dimana angka kriminalitas tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 416 kasus sementara terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 188. Kasus kriminalitas yang tertangani menunjukkan penurunan dari sebesar 95,26 persen pada tahun 2010 menjadi sebesar 71,81 persen pada tahun 2014.

Cakupan patroli petugas Satpol PP dalam 24 jam selama kurun waktu 2010-2014 berjalan secara konsisten yaitu sebesar 162 kali. Dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Satpol PP didukung sejumlah aparat, sampai dengan tahun 2014 rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk sebesar 1,5. Tugas Satpol PP menjaga ketertiban dan keamanan dibantu oleh masyarakat yang bertugas sebagai linmas. Tahun 2013 jumlah linmas per 10.000 penduduk sebesar 1,5. Sementara untuk mendukung tugas linmas dalam menjaga ketertiban dan keamanan tersedia sarana berupa Pos Siskamling, tahun 2014 rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan sebesar 14,44.

Peningkatan wawasan kebangsaan dilakukan dengan memberikan pengarahan dan sosialisasi terhadap Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kepemudaan (OKP). Tahun 2012 sebanyak 13 Ormas, LSM dan OKP mendapatkan pengarahan dan sosialisasi wawasan kebangsaan, dan tahun 2014 sebanyak 13 Ormas, LSM dan OKP mendapatkan pengarahan dan sosialisasi wawasan kebangsaan.

Kebebasan berorganisasi di masyarakat menunjukkan perkembangan yang baik, terlihat dari jumlah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun. Berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pemilu menunjukkan penurunan dari sebesar 71,20 persen pada Pemilihan Bupati tahun 2010, menjadi hanya 59,02 persen pada pemilihan Gubernur. Pembinaan politik daerah dilakukan dengan kegiatan pembinaan politik daerah, tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dilaksanakan masing-masing 2 kali.

Perkembangan kinerja urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41
Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum,
dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian	
			2013	2014
	Program Pembinaan dan Penegakan Perda.			
1.	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	%	83	84
2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	41	42
	Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat.			
1.	Angka kriminalitas	kasus	368	188
2.	Angka kriminalitas yang tertangani	kasus	304	135
		%	82,61	71,81
3.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	kali	162	162
4.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja	per 10.000 penduduk	1,5	1,5
5.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	per 10.000 penduduk	1,5	1,5
6.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	Poskamling	14,44	14,44
	Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan.			
1.	Peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan pada Ormas, LSM dan OKP	Ormas, LSM dan OKP	13	13
	Program Pendidikan Politik Masyarakat			
1.	Kegiatan pembinaan politik daerah	kali	2	2
2.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu	%	59,02 (Pilgub)	-
3.	Jumlah LSM (Lembaga swadaya masyarakat) yang terdaftar	LSM	46	-
4.	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar	Ormas	82	82

Sumber Data : Satpol PP dan Kesbangpol Kabupaten Purbalingga

6. Sosial

Persoalan yang dihadapi oleh Kabupaten Purbalingga dalam penanganan masalah sosial adalah jumlah PMKS yang semakin meningkat. Tahun 2009 jumlah PMKS mencapai 75.545 jiwa. Jumlah ini dinyatakan oleh Dinsosnakertrans terus bertambah, karena tingkat partisipasi dalam penanganan PMKS oleh lembaga masyarakat rendah. Tahun 2010 jumlah PMKS menjadi 224.926, Tahun 2011 menjadi 219.914, menurun tahun 2012 sebanyak 210.000, tahun 2013 199.912 dan tahun 2014 menjadi 190.702.

Cakupan PMKS yang menerima bantuan sosial belum memenuhi seluruh target. Penyebabnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program bantuan PMKS yang ada. Meskipun jumlah panti sosial meningkat, namun belum mampu mengatasi masalah PMKS yang juga terus meningkat jumlahnya. Panti sosial yang adapun membebankan pembiayaan kepada pemerintah daerah. Partisipasi swasta dalam bentuk CSR juga belum banyak bergerak mewadahi jumlah PMKS tersebut. Capaian kinerja PMKS yang memperoleh bantuan tidak mencapai 1 persen dari total jumlah PMKS. Rendahnya capaian kinerja ini akibat jumlah PMKS yang harus di cover terlalu banyak. Misalnya jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi mencapai 4.802, keluarga miskin 29.088, lansia terlantar yang baru mendapatkan bantuan hanya 155 orang dari 4.334 lansia terlantar.

Dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial hasil kinerja selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Urusan Sosial Di Kabupaten Purbalingga
Tahun 2013 – 2014

No	Indikator	Satuan	Capaian	
			2013	2014
	Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Keluarga Miskin.			
1	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	4,80	4,61
2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	0,294	0,443
3	Presentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%		
4	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	1,534	0,089
5	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	1,123	1,145
6	Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	100	100
7	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	%		18
8	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	0	0
	Program Penanggulangan Bencana			
9	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat			

Sumber Data : Dinsosnakertrans Kab. Purbalingga

2.3.2. Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

a. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja 15 tahun ke atas periode Tahun 2010-2014 bersifat fluktuatif dan cenderung meningkat dari 52,52% menjadi 67,31%. Secara absolut juga mengalami peningkatan dari 337.714 orang menjadi 443.845 orang. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.43

Tabel 2.43
Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2014

No	Tahun	Jumlah Penduduk yang Bekerja (orang)	Jumlah Penduduk Usia Kerja (orang)	Rasio Kesempatan Kerja (%)
4	2013	337.714	642.988	52,52
5	2014	443.845	659.371	67,31

Sumber: Purbalingga dalam Angka, 2015 (diolah)

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan jumlah angkatan kerja yaitu jumlah penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan terhadap jumlah seluruh penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014.

Tabel 2.44 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2014

Jenis Kelamin	Tahun	
	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	85,69	84,18
Perempuan	62,40	58,36
Total	73,76	70,95

Sumber : Sakernas 2013-2014

c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara penduduk yang tidak bekerja dan sedang

mencari pekerjaan dengan angkatan kerja. Menurut Sakernas, pengangguran mencakup mereka yang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha baru, dan mereka yang tidak mencari pekerjaan karena putus asa sudah berkali-kali mencari pekerjaan namun belum berhasil.

Tabel 2.45 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2014

Jenis Kelamin	Tahun	
	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	6,10	6,82
Perempuan	5,22	2,80
Total	5,72	5,13

Sumber : Sakernas 2012-2013

d. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Persentase pencari kerja yang ditempatkan terhadap pencari kerja yang terdaftar dalam kurun waktu tahun 2010-2014 mengalami peningkatan dari 16,89% menjadi 37,05%. Namun demikian pada tahun 2012 mengalami penurunan dari 46,43% (2011) menjadi 10,54%.

**Tabel 2.46
Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2014**

Tahun	Pencari Kerja yang Terdaftar	Pencari Kerja yang Ditempatkan	Persentase
2013	13.959	3.128	22,41
2014	12.012	4.450	37,05

Sumber: DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Purbalingga, 2015

e. Penduduk yang Bekerja

Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Purbalingga tahun 2014 sebesar 94,87 dan tahun 2013 sebesar 94,28. Menurut data hasil Sakernas 2014 seperti ditunjukkan pada tabel 2.47, penduduk yang bekerja 60,61 persennya adalah lulusan SD kebawah termasuk diantaranya tidak/belum pernah sekolah sebesar 3,65 persen. Jumlah penduduk yang bekerja dengan pendidikan SLTP sebesar 20,42 persen, berpendidikan SLTA 13,46 persen sedangkan yang berpendidikan diploma hingga srata 2 hanya 5,51 persen. Masih besarnya penduduk bekerja dengan pendidikan SD kebawah menggambarkan bahwa tenaga kerja di Kabupaten Purbalingga sebagian besar adalah tenaga kerja

terampil yang tidak mengharuskan pendidikan tinggi.

Tabel 2.47 Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Kabupaten Purbalingga Tahun 2014

Pendidikan Yang Ditamatkan	Jenis Kelamin		Laki-laki+Perempuan
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/belum sekolah	2.77	4.83	3.65
Tidak/belum tamat SD	19.88	21.77	20.69
SD/MI	38.40	33.45	36.27
SLTP	18.59	22.86	20.42
SLTA	14.62	11.90	13.46
DI/DII/DIII/S1	5.74	4.91	5.39
S2, S3	0.00	0.27	0.12
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber :Sakernas 2014

Sementara itu jika dilihat menurut lapangan usaha utama maka penduduk usia kerja sebagian besar bekerja di manufaktur yaitu sebesar 40,98 persen, pertanian 30,51 persen, disusul jasa 28,52 persen.

Tabel 2.48 Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama dan Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga Tahun 2014

Lapangan UsahaUtama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Permpuan	Laki+Permp
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	35.38	24.09	30.51
Manufaktur	37.46	45.60	40.98
Jasa	27.16	30.31	28.52
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Sakernas 2014

Pada tabel 2.48 juga memperlihatkan bahwa untuk tenaga kerja laki-laki dan perempuan lebih mendominasi di manufaktur namun jika dilihat menurut jenis kelamin proporsi perempuan lebih banyak yang bekerja di manufaktur (industri) yaitu sebesar 45,60 persen, sedangkan tenaga kerja laki-laki di manufaktur 37,46 persen. Kondisi ini sesuai dengan keadaan ketenagakerjaan di Kabupaten Purbalingga dimana industri pengolahan khususnya industri rambut palsu dan industri bulu mata palsu di

Purbalingga banyak merekrut tenaga kerja perempuan.

Tabel 2.49 Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga Tahun 2014

Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Permpuan	Laki+Permp
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	14.15	11.29	12.91
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tdk dibayar	28.80	11.95	21.53
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	5.38	0.90	3.45
Buruh/Karyawan/Pegawai	32.03	44.51	37.41
Pekerja Bebas Pertanian/Non Pertanian	16.48	6.57	12.20
Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	3.17	24.79	12.50
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Sakernas 2014

Selanjutnya penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama pada tabel 2.49. Terlihat bahwa sebanyak 37,41 persen penduduk yang bekerja adalah berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai dengan persentase laki-laki 32,03 persen dan perempuan 44,51 persen. Mayoritas perempuan yang bekerja di Kabupaten Purbalingga adalah sebagai buruh dan juga sebagai pekerja keluarga yaitu 24,79 persen. Sementara penduduk laki-laki selain sebagai buruh, sebagian besar juga berstatus sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar yaitu 28,80 persen yang bekerja di lapangan pekerjaan pertanian.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a. Persentase Partisipasi Perempuan Bekerja Di Swasta

Peningkatan kualitas hidup perempuan dilaksanakan melalui berbagai bidang pembangunan, diantaranya dengan meningkatkan partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga swasta.

Tabel 2.50
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
di Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2014

No	Uraian	Tahun	
		2013	2014
1	Jumlah Pekerja Perempuan (orang)	188.083	189.949

No	Uraian	Tahun	
		2013	2014
2	Jumlah Pekerja Perempuan di lembaga swasta (orang)	184.732	188.131
3	Persentase Pekerja Perempuan di lembaga swasta (%)	98,22	99,04

Sumber: Sakernas BPS, 2008-2013 (diolah)

b. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Purbalingga berdasarkan data Sakernas menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja perempuan pada Tahun 2014 mengalami penurunan bila dibandingkan Tahun 2013. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.51

Tabel 2.51
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
di Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2014

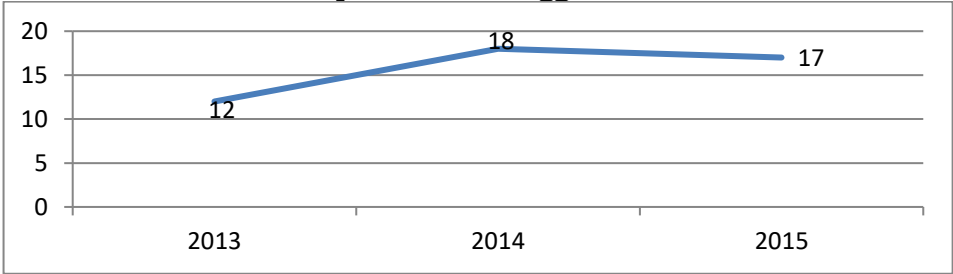
No	Uraian	Tahun	
		2013	2014
1	Jumlah penduduk usia kerja perempuan (orang)	318.028	334.840
2	Jumlah angkatan kerja perempuan (orang)	325.745	195.415
3	Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk usia kerja (%)	102,43	58,36

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, Sakernas, 2014

c. Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada Gambar 2.52

Gambar 2.52
Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2015



3. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Program Peningkatan Pelayanan, Perlindungan dan Pembinaan Kepesertaan KB

Capaian indikator program peningkatan pelayanan, perlindungan dan pembinaan kepesertaan KB dapat dilihat pada tabel 2.53

Tabel 2.53
Capaian Indikator Program Peningkatan, Perlindungan dan Pembinaan
Kepesertaan KB Kabupaten Purbalingga Tahun 2014-2015

No	Uraian dan Indikator	Tahun	
		2014	2015
1	Laju pertumbuhan penduduk	0,32	0,9
2	Jumlah ketersediaan alat dan obat kontrasepsi	145670	143826
3	Persentase kepesertaan KB	79,47%	76,40%
4	Jumlah peserta aktif KB pria	5233	4593
5	Cakupan peserta KB aktif/Contraseptive Prevalence Rate	153419	143826
6	Jumlah penanganan kasus terkait layanan KB	5	1
7	Persentase penanganan kasus terkait layanan KB	100%	100%
8	Jumlah kelompok akseptor/ institusi masyarakat yang aktif	23	18
9	Jumlah kelompok akseptor/ institusi masyarakat yang dibina	26	28
10	Jumlah keluarga sesuai norma keluarga kecil bahagia dan sederhana	86790	88005
11	Jumlah keluarga pra sejahtera	71844	71948
12	Jumlah keluarga sejahtera I	58112	57910
13	Jumlah keluarga sejahtera II	77140	77443
14	Jumlah keluarga sejahtera (KS III dan KS III+)	80843	81135

Sumber: BKBPP Kabupaten Purbalingga, 2015

4. Pangan

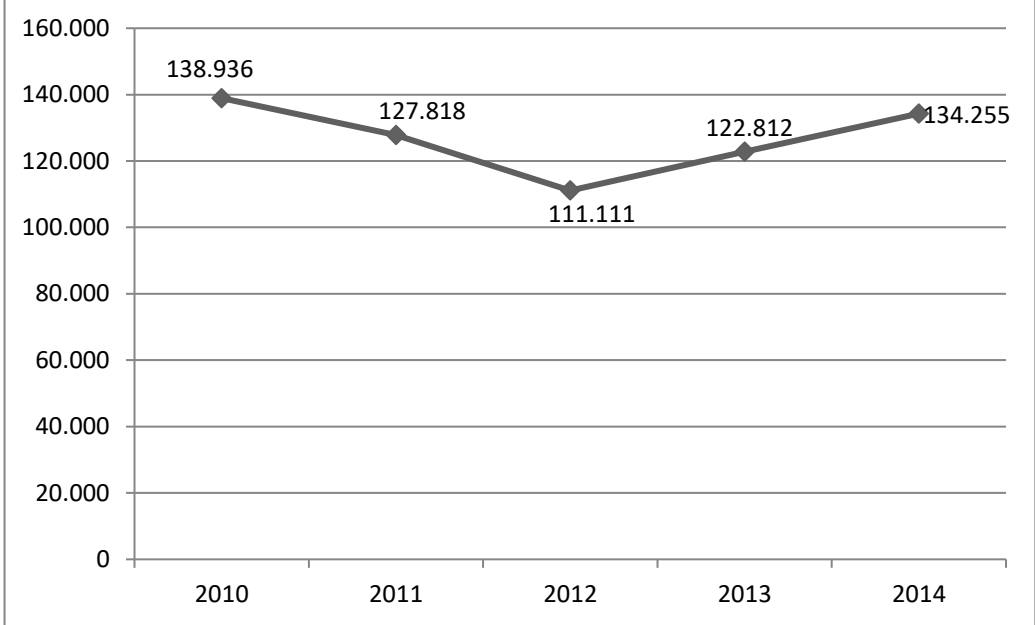
Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat sub sistem yaitu: (a) Ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal serta cadangan pangan, (b) Keterjangkauan pangan melalui pemantapan distribusi, pemasaran, perdagangan, informasi; (c) konsumsi pangan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan; (d) keamanan pangan melalui sanitasi, pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan.

Untuk menjaga ketersediaan pangan telah dilakukan upaya untuk mempertahankan luas lahan sawah di Kabupaten Purbalingga di tahun 2013 dan 2014 secara berturut-turut sebesar 20.961 Ha dan 20.737 Ha dengan luas penurunan lahan sawah sebesar 224 Ha. Sehingga persentase penurunan lahan sawah sebesar 1,07 persen.

Jumlah penduduk yang bekerja disektor pertanian dalam kurun waktu 2010-2015 mengalami penurunan dari tahun 2012 dan naik kembali ditahun 2013 sampai 2014.

Gambar 2.54

Jumlah Penduduk yang Bekerja di Sektor Pertanian di Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2014



Sumber : Jawa Tengah dalam Angka 2011-2015

5. Pertanahan

Pelayanan umum kepada masyarakat di urusan pertanahan, bertujuan untuk mempertahankan kelestarian lahan dan lingkungan. Beberapa hal yang dilakukan antara lain dengan memberikan insentif kepada masyarakat dalam rangka mempertahankan lahan pertanian, serta memberikan sertifikat tanah masyarakat yang berada di kawasan lindung dan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).

Tabel 2.55
Luas Wilayah dirinci Menurut Penggunaan Tanah, 2013-2014

Penggunaan Tanah	2013		2014	
	Luas (Ha)	Persentase (%)	Luas (Ha)	Persentase (%)
Sawah	21.895	28,16	21.849	28,1
Perkampungan	19.072	24,53	19.083	24,54
Kebun Campur	4.532	5,83	4.532	5,83
Tegalan	17.344	22,3	17.344	22,3
Perkebunan	16	0,02	16	0,02
Perikanan	95	0,12	95	0,12
Hutan	11.328	14,57	11.328	14,57
Lain-lain	3.481	4,48	3.516	4,52
Jumlah	77.764	100,00	77.764	100,00

Sumber: Purbalingga Dalam Angka 2015

6. Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Purbalingga dapat ditunjukkan dengan penerapan dan pencapaian target SPM Bidang Lingkungan Hidup, yaitu informasi status mutu air, informasi status mutu udara dan jumlah pengaduan dugaan pencemaran/ kerusakan

lingkungan yang ditindaklanjuti. Selengkapnya untuk kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Kabupaten Purbalingga selama tahun 2013-2015 dapat dilihat pada tabel 2.56

Tabel 2.56
Kinerja Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2015

No	Indikator	2013	2014	2015
1	Informasi status mutu air (SPM) sungai	memenuhi baku mutu	memenuhi baku mutu	memenuhi baku mutu
2	Informasi status mutu udara ambien (SPM)	memenuhi baku mutu	memenuhi baku mutu	memenuhi baku mutu
3	Jumlah pengaduan akibat dugaan pencemaran/ kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti (SPM) %	100%	100%	100%

Sumber: BLH Kabupaten Purbalingga, 2015

7. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya, Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas yang memuat data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, status kegiatan, status pekerjaan, status kecacatan dan lain sebagainya.

Tabel 2.57
Jumlah Kepala Keluarga dan Kepemilikan Kartu Keluarga
Per Kecamatan Tahun 2015

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA			JUMLAH KEPALA KELUARGA MEMILIKI KARTU KELUARGA					
		L	P	JML	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JML	
					N	%	N	%	N	%
1	KEMANGKON	16.325	3.469	19.794	16.088	98,55	3.106	89,54	19.194	96,97
2	BUKATEJA	19.191	4.082	23.273	18.978	98,89	3.768	92,31	22.746	97,74
3	KEJOBONG	13.384	2.401	15.785	13.176	98,45	2.094	87,21	15.270	96,74
4	KALIGONDANG	16.397	3.828	20.225	16.287	99,33	3.617	94,49	19.904	98,41
5	PURBALINGGA	15.237	3.356	18.593	15.094	99,06	3.173	94,55	18.267	98,25
6	KALIMANAH	14.527	2.580	17.107	14.315	98,54	2.304	89,30	16.619	97,15
7	KUTASARI	16.068	2.723	18.791	15.875	98,80	2.406	88,36	18.281	97,29
8	MREBET	20.124	3.117	23.241	19.773	98,26	2.589	83,06	22.362	96,22
9	BOBOTSARI	13.959	2.669	16.628	13.775	98,68	2.394	89,70	16.169	97,24
10	KARANGREJA	11.805	1.088	12.893	11.655	98,73	846	77,76	12.501	96,96
11	KARANGANYAR	10.069	2.055	12.124	9.902	98,34	1.855	90,27	11.757	96,97
12	KARANGMONCOL	14.200	2.515	16.715	13.920	98,03	2.025	80,52	15.945	95,39
13	REMBANG	17.161	2.652	19.813	16.788	97,83	1.994	75,19	18.782	94,80
14	BOJONGSARI	14.510	2.733	17.243	14.340	98,83	2.432	88,99	16.772	97,27
15	PADAMARA	10.995	1.708	12.703	10.913	99,25	1.573	92,10	12.486	98,29
16	PENGADEGAN	10.071	1.802	11.873	10.005	99,34	1.680	93,23	11.685	98,42

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA			JUMLAH KEPALA KELUARGA MEMILIKI KARTU KELUARGA					
		L	P	JML	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JML	
					N	%	N	%	N	%
17	KARANGJAMBU	5.972	831	6.803	5.902	98,83	674	81,11	6.576	96,66
18	KERTANEGARA	8.671	1.832	10.503	8.590	99,07	1.671	91,21	10.261	97,70
JUMLAH		248.666	45.441	294.107	245.376	98,68	40.201	88,47	285.577	97,10

Sumber: DAK2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, 2015

Tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 294.107 kepala keluarga di Kabupaten Purbalingga yang sudah memiliki Kartu Keluarga Nasional sampai akhir 2015 sebanyak 285.577 kepala keluarga atau 97,10%. Jika menurut wilayah kecamatan, dapat dilihat bahwa wilayah Kecamatan Kaligondang merupakan wilayah dengan persentase kepemilikan KK tertinggi 98,41% yang diikuti wilayah Kecamatan Purbalingga yakni 98,25%. Sedangkan persentase kepemilikan kartu keluarga terendah terdapat di wilayah Kecamatan Rembang sebanyak 94,80%.

b. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Seperti Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk hampir selalu menjadi persyaratan publik lainnya di Kabupaten Purbalingga sehingga hampir semua Penduduk (legal) memiliki KTP-el. Sampai dengan akhir tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga yang memiliki KTP dan telah melakukan perekaman KTP-el sebanyak 654.938 jiwa (91,28 persen) dari wajib KTP sebanyak 716.907 jiwa.

Tabel 2.58
Hasil Pelaksanaan Perekaman KTP-EL di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015

NO	KECAMATAN	JUMLAH KTP-EL				
		JUMLAH WAJIB KTP KUOTA	TEREKAM			
			JUMLAH	%	KURANG	%
1	KEMANGKON	45.046	43.170	95,84	1.876	4,16
2	BUKATEJA	54.513	51.296	94,10	3.217	5,90
3	KEJOBONG	36.821	33.530	91,06	3.291	8,94
4	KALIGONDANG	45.354	42.884	94,55	2.470	5,45
5	PURBALINGGA	44.250	41.448	93,67	2.802	6,33
6	KALIMANAH	41.021	37.669	91,83	3.352	8,17
7	KUTASARI	43.096	39.449	91,54	3.647	8,46
8	MREBET	57.603	48.890	84,87	8.713	15,13
9	BOBOTSARI	39.132	36.272	92,69	2.860	7,31
10	KARANGREJA	34.181	28.048	82,06	6.133	17,94
11	KARANGANYAR	29.152	28.890	99,10	262	0,90
12	KARANGMONCOL	42.677	37.962	88,95	4.715	11,05
13	REMBANG	53.913	46.538	86,32	7.375	13,68

NO	KECAMATAN	JUMLAH KTP-EL				
		JUMLAH WAJIB KTP KUOTA	TEREKAM			
			JUMLAH	%	KURANG	%
14	BOJONGSARI	43.996	41.576	94,50	2.420	5,50
15	PADAMARA	32.316	29.615	91,64	2.701	8,36
16	PENGADEGAN	28.568	26.484	92,71	2.084	7,29
17	KARANGJAMBU	19.310	16.619	86,06	2.691	13,94
18	KERTANEGARA	25.958	24.058	92,68	1.900	7,32
JUMLAH		716.907	654.398	91,28	62.509	8,72

Sumber: DAK2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, 2015

Tabel diatas menunjukkan bahwa prosentase hasil perekaman KTP-el tertinggi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 adalah Kecamatan Karanganyar sebanyak 28.890 jiwa (99,10 persen), adapun perekaman terendah adalah Kecamatan Karangreja yaitu sebanyak 28.048 jiwa (82,06 persen). Untuk mengejar capaian perekaman KTP-el di kecamatan perlu ditingkatkan pelayanan KTP-el jemput bola yang waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.

c. Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil

Akta catatan sipil merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan berdampak hukum terhadap status keperdataan seseorang. Oleh karenanya, setiap penduduk yang mengalami peristiwa penting wajib dicatat untuk mendapatkan akta pencatatan sipil.

Akta kelahiran menimbulkan hukum keperdataan antara anak dan kedua orang tuanya. Akta perkawinan menimbulkan hubungan hukum keperdataan antara suami dan isteri serta anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Akta kematian merupakan dokumen untuk dapat dibukanya pembagian waris, pensiun, asuransi dan lain-lain. Akta perceraian merupakan dokumen legal yang membuktikan putusnya sebuah perkawinan. Akta pengakuan anak merupakan dokumen legal yang menimbulkan hubungan hukum keperdataan antara anak yang lahir diluar perkawinan dengan ayah biologis.

Belum lengkapnya informasi yang diberikan oleh penduduk dalam mengisi Formulir F,1,01 khususnya informasi tentang kepemilikan akta pencatatan sipil seperti akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak dan akta pengesahan anak. Hal ini menyebabkan sulitnya

memperoleh informasi tentang kepemilikan akta-akta catatan sipil oleh penduduk dari database kependudukan SIAK.

1) Kepemilikan Akta Kelahiran

Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Purbalingga yang tercatat pada database SIAK sebanyak 713.502 jiwa (76,66 persen). Persentase kepemilikan akta kelahiran terbesar adalah Kecamatan Pengadegan yakni sebanyak 99,75 persen sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Rambang yakni sebanyak 61,99 persen. Kepemilikan akta Kelahiran yang terdapat dalam database SIAK Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 2.59
Kepemilikan Akta Kelahiran per Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk Memiliki Akta Kelahiran		Jumlah Penduduk		Kepemilikan Akta Kelahiran (%)
		N	%	N	%	
1	KEMANGKON	44.130	6,18	59.971	6,44	73,59
2	BUKATEJA	46.109	6,46	73.803	7,93	62,48
3	KEJOBONG	40.409	5,66	48.491	5,21	83,33
4	KALIGONDANG	43.760	6,13	61.500	6,61	71,15
5	PURBALINGGA	45.880	6,43	57.841	6,21	79,32
6	KALIMANAH	39.702	5,56	53.903	5,79	73,65
7	KUTASARI	40.349	5,66	59.474	6,39	67,84
8	MREBET	43.900	6,15	73.951	7,95	59,36
9	BOBOTSARI	42.454	5,95	52.596	5,65	80,72
10	KARANGREJA	40.794	5,72	43.538	4,68	93,70
11	KARANGANYAR	37.468	5,25	38.378	4,12	97,63
12	KARANGMONCOL	40.694	5,70	56.949	6,12	71,46
13	REMBANG	41.362	5,80	66.721	7,17	61,99
14	BOJONGSARI	39.812	5,58	52.753	5,67	75,47
15	PADAMARA	39.523	5,54	39.881	4,28	99,10
16	PENGADEGAN	35.424	4,96	35.514	3,82	99,75
17	KARANGJAMBU	18.912	2,65	21.967	2,36	86,09
18	KERTANEGARA	32.820	4,60	33.493	3,60	97,99
JUMLAH		713.502	100,00	930.724	100,00	76,66

Sumber: DAK2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, 2015

2) Kepemilikan Akta Perkawinan

Penduduk yang berstatus menikah adalah 490.965 jiwa sementara kepemilikan kutipan akta perkawinan berjumlah 490.324 buah, dengan demikian masih terdapat penduduk

berstatus nikah tetapi tidak memiliki kutipan akta nikah sebanyak 641 jiwa.

Tabel 2.60
Kepemilikan Akta Perkawinan di Kabupaten Purbalingga
Tahun 2015

No	Jumlah Penduduk Memiliki Akta Perkawinan	Jumlah Penduduk Berstatus Kawin	Prosentase Kepemilikan Akta Perkawinan
1	490.324	490.965	99,87

Sumber: DAK2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, 2015

8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan desa disusun dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Program-program pembangunan yang diarahkan ke desa wajib disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dilakukan dengan melibatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LKMD/K) desa/kelurahan.

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Kinerja pembangunan perikanan salah satunya dapat dilihat dari Produksi perikanan Budidaya. Dalam kurun waktu tahun 2013-2015 terjadi penurunan produksi perikanan dari sebesar 10.895 ton pada tahun 2010 menjadi sebesar 7.210 pada tahun 2015. Kondisi ini

dipengaruhi oleh keterbatasan lahan yang dimiliki oleh para pembudidaya ikan.

Tingkat konsumsi ikan masyarakat di Purbalingga masih belum optimal. Pada tahun 2015 tingkat konsumsi ikan sebanyak 19,9 per kapita pertahun. Kondisi itu masih jauh dengan tingkat konsumsi ikan nasional yang berada di angka 35 kilogram per kapita pertahun. Masih minimnya tingkat konsumsi ikan di masyarakat karena ketersediaan ikan di masyarakat belum maksimal. Salah satunya mengenai akses masyarakat untuk mendapatkan ikan di pasar. Penyebab lainnya yaitu masih belum dikenalnya produk olahan ikan di masyarakat. Selain itu masih ada anggapan olahan ikan masih berbau menyengat (amis). Sehingga masyarakat masih enggan mengonsumsi olahan ikan itu.

Gambaran pencapaian target kinerja indikator urusan perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.61
Kinerja Pembangunan Urusan Perikanan
Tahun 2012-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian			
			2012	2013	2014	2015
1.	Produksi benih ikan	ton	301.000	365.241	305.068	115.442
2.	Produksi Ikan budidaya	ton		10.895	7.219	7.210
3.	Luas kolam	ha	108	112	112	112
4.	Jumlah pembudidaya ikan	orang		10.711	10.771	11.700
5.	Jumlah produksi ikan tangkap			249,2	242,2	249,5
6.	Jumlah produksi hasil olahan ikan	Ton			2.961	1.590
7.	Jumlah Pasar Ikan	Unit	2	7	9	12
8.	Kapasitas pasar ikan	pedagang	74	96	141	129

Sumber: Dinnakan Kab. Purbalingga

2. Pariwisata

Sektor Pariwisata saat ini sangat penting dalam pengembangan perekonomian daerah. Sektor pariwisata dapat dijadikan sumber pendapatan daerah yang potensial. Pariwisata tumbuh dari upaya memanfaatkan potensi alam maupun dengan membuat obyek wisata buatan yang memiliki kekhasan dan keunggulan suatu daerah.

Kabupaten Purbalingga beberapa tahun terakhir mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam bidang pariwisata. Kemajuan di sektor pariwisata antara lain dibangunnya taman wisata air Owabong

dan Purbasari, taman reptil (reptile park), museum uang, dll. Pendapatan dari sektor pariwisata memberikan kontribusi yang cukup besar bagi APBD Kabupaten Purbalingga.

Kinerja urusan Pariwisata dapat dilihat dari beberapa indikator dibawah ini, diantaranya yaitu pada Program pengembangan destinasi pariwisata ada 4 indikator, yaitu indikator jumlah obyek wisata, jumlah wahana baru pada obyek wisata, jumlah kelompok sadar wisata/pemandu wisata, jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata. Dan pada program pengembangan promosi pariwisata terdapat indikator yaitu nilai tambah sector-sektor pendukung pariwisata, PDRB sektor hotel dan restoran, PDRB sektor transportasi, jumlah kunjungan wisatawan, rata-rata tingkat hunian hotel, rata-rata lama tinggal wisatawan, jumlah PAD sektor pariwisata.

Secara rinci pencapaian kinerja urusan pariwisata dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.62
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Purbalingga
Tahun 2010-2014

No	Indikator	Satuan	Capaian			
			2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah obyek wisata unggulan	Unit	5	5	5	5
2.	Jumlah wahana baru pada obyek wisata	Unit	2	3	8	9
3.	Jumlah kelompok sadar wisata / pemandu wisata	kelompok	6	7	7	9
1.	Jumlah kunjungan wisatawan (Wisman dan Wisnus)	Orang	1.412.060	1.507.707	1.530.679	1.458.513
2.	Rata-rata tingkat hunian hotel	Persen	6,93	7,27	14,00	15,00
3.	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	1	1	1,5	1,5
4.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	2,035	2,069	2,086	2,698
5.	Jumlah restoran	Unit	20	20	20	20
6.	Jumlah penginapan/ hotel	Unit	10	10	10	11

Sumber Data : Dinbudparpora Kabupaten Purbalingga

3. Pertanian

Pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam hal pengelolaan Sarana Pertanian; pengembangan prasarana pertanian; pemeliharaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian; serta pemberian Perizinan Usaha Pertanian. Kewenangan yang dimiliki

tersebut menjadi landasan bagi Kabupaten Purbalingga dalam pengelolaan di sektor pertanian.

Sektor pertanian masih memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Purbalingga atas dasar harga berlaku yaitu sebesar 29,86 persen. Potensi pertanian tanaman pangan di Kabupaten Purbalingga meliputi Padi sebesar 220.695 ton, Jagung 51.945 ton, ubi kayu 2.556 ton, dan kedele hanya 823 ton. Dilihat dari produktivitasnya, baik padi, jagung, ubi kayu maupun kedelai dalam kurun waktu tahun 2010-2013 menunjukkan peningkatan. Hal ini didukung dengan berbagai upaya revitalisasi pertanian serta peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur pertanian. Namun demikian tingkat penggunaan pupuk dan obat kimia di sektor pertanian masih tinggi. Hal ini tentunya perlu dikurangi agar dapat mengurangi pencemaran dan dapat mempertahankan kesuburan tanah pertanian.

Potensi peternakan di Kabupaten Purbalingga yang utama adalah sapi potong, kambing, ayam ras petelur, ayam buras, dan ayam ras potong. Dalam kurun waktu tahun 2010-2014 beberapa jenis hewan ternak populasi ternak mengalami penurunan, seperti sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, dan puyuh. Sementara beberapa jenis hewan ternak mengalami peningkatan populasi, meliputi: Ayam buras, Ayam Ras petelur, Ayam Ras pedaging, Itik, dan Kelinci. Hasil peternakan di Kabupaten Purbalingga meliputi daging, telur dan susu, dengan kecenderungan mengalami peningkatan.

Secara rinci kinerja pembangunan pada urusan pertanian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.63
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pertanian
Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 – 2015

No	Indikator	Satuan	Capaian			
			2012	2013	2014	2015
1.	Nilai tukar petani		101,59	103,46	101,76	99,04
2.	Jangkauan pemasaran produk pertanian (lokal, provinsi, nasional, ekspor)		Lokal, Provinsi, Nasional, Ekspor	Lokal, Provinsi, Nasional, Ekspor	Lokal, Provinsi, Nasional, Ekspor	Lokal, Provinsi, Nasional, Ekspor
1.	Produksi pertanian tanaman pangan (per komoditas)					
	<i>Padi</i>	ton	209.654	226.819	213.030	219.211

	Jagung	ton	51.945	53.248	51.945	35.704
	Kedele	ton	823	256	823	211
	Ubi kayu	ton	147.643	149.847	2.556	68.448
2.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar					
	Padi Sawah	Kw/Ha	58.89	58,97	59,23	56,48
	Jagung	Kw/Ha	54.79	54,53	54,73	56,34
	Kedele	Kw/Ha	16.67	16,02	16,11	14,15
	Ubi kayu	Kw/Ha	299.80	281,06	281,19	272,16
3.	Tingkat penggunaan pupuk dan obat kimia di sektor pertanian (Ton)					
	Urea	Ton	15,327	15,237	15.237	14,819
	ZA	Ton	1,098	1,098	1.098	891
	SP36	Ton	1,407	1,407	1.407	1,340
	Phonska	Ton	2,901	2,901	2.901	5,101
	Organik (Pabrikan)	Ton	732	732	732	3,172
1.	Jumlah semen	straw	3.350	2.228	2.843	8.500
2.	Jumlah populasi ternak per jenis:					
	sapi potong	ekor	22.150	22.148	15.810	13.522
	sapi perah	ekor	197	205	187	116
	Kerbau	ekor	6.213	5.211	1.513	1.152
	Kambing	ekor	292.725	292.800	272.655	375.471
	Domba	ekor	44.719	44.725	47.260	56.821
	Ayam buras	ekor	1.679.600	1.679.620	1.799.629	2.139.738
	Ayam Ras petelur	ekor	NA	865.600	725.459	738.009
	Ayam Ras pedaging	ekor	NA	6.500.000	3.470.585	4.570.760
	Itik	ekor	132.005	109.096	99.654	119.326
	Puyuh	ekor	102.040	102.040	43.965	57.610
	Kelinci	ekor	3.519	4.675	7.948	9.958
3.	Jumlah produksi hasil peternakan					
	daging	kg	4 .871.168	7 .138.961	6.817.619	9.346.174
	telur	butir	9.243.349	14.600.100	20.676.201	NA
	susu	liter	24.638	47.000	74.825	NA

Sumber: Dintanbunhut dan Dinakkan Kabupaten Purbalinga

4. Kehutanan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Dilihat berdasarkan statusnya terdiri dari dari hutan negara dan hutan hak. Pemerintah telah menetapkan hutan berdasarkan fungsinya, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Kewenangan Pemerintah daerah kabupaten/kota relatif terbatas, yaitu hanya pada pelaksanaan pengelolaan Taman

Hutan Raya (TAHURA) kabupaten/kota dalam upaya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Beberapa peran dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten yaitu melakukan pencegahan kerusakan hutan dan lahan, serta penanganan lahan kritis.

Di Kabupaten Purbalingga terdapat hutan lindung dan hutan produksi. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Saat ini luas kawasan hutan lindung di Kabupaten Purbalingga adalah 14.592 ha. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Produksi hasil hutan kayu di Kabupaten Purbalingga sampai pada tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan produksi tahun 2012. Peningkatan khususnya pada jenis kayu jati, pinus, albasia, dan jenis kayu lain. Produksi hutan non kayu juga mengalami peningkatan khususnya pada jenis kayu bakar dan kopal.

Luas lahan kritis di area hutan lindung pada tahun 2015 mencapai 758 ha, sedangkan Luas lahan kritis di kawasan budidaya pertanian pada tahun 2014 seluas 5.734.00 ha. Beberapa upaya telah dilakukan dalam rangka penanganan lahan kritis, baik secara sipil teknis maupun vegetatif. Tentunya penanganan lahan kritis ini perlu ditingkatkan untuk memperbaiki kondisi lingkungan.

Secara rinci perkembangan capaian kinerja urusan kehutanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.64
Perkembangan Indikator Urusan Kehutanan
Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian			
			2012	2013	2014	2015
	Jumlah produksi Hasil Hutan kayu:					
1.	Jati	M3	444.595	451.987	875.570	1.891,29
2.	Mahoni	M3	409.643	415.564	1.055	1.507,88
3.	Pinus	M3	942.366	955.211	1.914.600	1.940,16
4.	Albasia	M3	5.913.646	5.988.654	7.450.320	13,281,73
5.	Kayu lain	M3	88.948	89.786	773.013	1.707,76
6.	Kopal	M3	99.206	100.675	169.394	17,96
7.	Getah Pinus	M3	972.447	988.167	3.982	753,45
1.	Kawasan Hutan Lindung		14.592	14.592	14.542	14.542

No	Indikator	Satuan	Capaian			
			2012	2013	2014	2015
2.	Tingkat sedimentasi	mm/th	2,42	2	2	2
3.	Tingkat erosi	mm/th	35,04	26	26	20
4.	Luas lahan kritis di kawasan lindung	Ha	1.293	1.157	1.157	758
5.	Luas lahan kritis di kawasan budidaya pertanian		7.101	5.734	5.734	NA
6.	cakupan rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara sipil teknis	Ha	34	36	36	NA
7.	cakupan rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara vegetatif	Ha	1.488	3.342	3.342	NA

5. Energi dan sumber daya mineral

Perkembangan capaian kinerja Sumberdaya Mineral secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.65
Capaian Kinerja Indikator Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2013

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			2011	2012	2013
1.	Kapasitas air baku PDAM	m ³	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2.	Debit mata air	m ³	80-1000	699,74	699,74
3.	Debit sungai	m ³	0.026-17,33	0.026-17,33	0.026-17,33

Sumber : DPU Kabupaten Purbalingga

6. Perdagangan

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang perdagangan mencakup Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan; Sarana Distribusi Perdagangan; Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; Pengembangan Ekspor; serta Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Di Kabupaten Purbalingga, kinerja urusan perdagangan menunjukkan perkembangan yang baik. Penyelenggaraan perizinan dan pendaftaran diselenggarakan oleh KPMPT. Berkaitan dengan kondisi sarana dan prasarana, terlihat bahwa Persentase pasar yang memenuhi persyaratan capaiannya hanya sebesar 90 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat pasar yang memerlukan perbaikan sehingga kondisinya menjadi layak. Sementara itu berkaitan dengan PKL kinerjanya sudah baik, dengan capaian persentase PKL yang tertata sebesar 10 persen.

Total nilai ekspor dalam kurun waktu lima tahun cenderung meningkat dari sebesar Rp 851.016.427.457,80 pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp 1.357.957.424.792,53. Tentunya jumlah ekspor

ini perlu ditingkatkan dengan menambah produk yang bisa diterima pasar internasional melalui pemasaran dan perbaikan mutu produk industri. Adapun berkaitan dengan perlindungan konsumen, kinerjanya sudah optimal ditunjukkan dengan indikator Tingkat Terlindunginya konsumen yang mencapai 100 persen, artinya dari seluruh pasar tradisional dan pasar modern yang ada telah dilakukan pengawasan.

Perkembangan kinerja urusan perdagangan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.66
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Purbalingga
Tahun 2010-2014

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2010	2011	2012	2013	2014
1.	Tingkat Terlindunginya konsumen	persen	100	100	100	100	100
2.	Penganganan pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	100
3.	Total nilai ekspor	Miliar rupiah	851	1.444	1.144	1.357	-
4.	Pembangunan promosi perdagangan Internasional	%	10%	10%	10%	10%	10%
5.	Jumlah produk yang bisa diterima pasar internasional	Produk	4	4	4	4	4
6.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	10%	10%	10%	10%	10%
7.	Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	persen	90%	90%	90%	90%	90%
8.	Persentase lokasi PKL yang tertata		100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinperindagkop Kab. Purbalingga

7. Perindustrian

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang perindustrian mencakup Perencanaan Pembangunan Industri; Perizinan; dan Sistem Informasi Industri Nasional. Jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Purbalingga menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu empat tahun dari sebesar 35.868 unit pada tahun 2010 menjadi sebanyak 43.250 unit. Jumlah sentra industri juga menunjukan peningkatan dari sebanyak 186 persen pada tahun 2010 menjadi 191 persen pada tahun 2012.

Berkaitan dengan inovasi iptek, jumlah industri mikro kecil dan menengah menggunakan inovasi teknologi sampai dengan tahun 2012

sebanyak 609 unit. Sementara itu persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi sebanyak 20,96 persen pada tahun 2013. Berkaitan dengan menggunakan bahan baku, Jumlah industri berbahan baku lokal meningkat dari sebanyak 21,521 unit pada tahun 2010 menjadi 23.115 unit pada tahun 2012. Adapun Persentase klaster industri yang berkembang sebanyak 38,89 persen. Perkembangan kinerja urusan perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.67
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2010	2011	2012	2013	2014
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	persen	2,08	2,20	2,33	2,46	2,83
2	Jumlah industri (rumah tangga, kecil, menengah) yang menggunakan inovasi teknologi	Unit	566	595	609	-	-
3	Jumlah penerapan standarisasi produk industri (SNI)	Unit	3	4	5	5	5
4	Jumlah industri kecil dan menengah	Unit	35.868	38.879	41.530	43.250	47.456
5	Persentase IKM, yang telah mengikuti pameran promosi produk	Unit	2-3	2-3	2-3	2-2	2-3
6	Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	persen	15,08	18,65	19,42	20,96	21
7	Persentase klaster industri yang berkembang	persen	32,00	34,48	37,14	38,89	-
8	Jumlah sentra-sentra industri	unit	186	189	191	192	194
9	Jumlah industri berbahan baku lokal	unit	21,521	22.572	23.115	-	-

Sumber: Dinperindagkop Kab. Purbalingga

8. Transmigrasi

Upaya peningkatan kesejahteraan penduduk salah satunya dilakukan dengan transmigrasi penduduk. Transmigrasi adalah pemindahan penduduk dari daerah yang kepadatan penduduknya tinggi ke daerah yang kepadatan penduduknya rendah. Tujuan dari transmigrasi yaitu melakukan penempatan penduduk secara merata diseluruh daerah. Pemberangkatan transmigran dari Kabupaten Purbalingga cenderung fluktuatif, pada tahun 2011 diberangkatkan 20 KK, dan pada tahun 2014 diberangkatkan sebanyak 15 KK, seperti

terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.68
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga
Tahun 2010-2014

No	Indikator	Capaian			
		2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah transmigran umum	20 KK / 72 jiwa	30 KK / 106 jiwa	29 KK / 111 jiwa	15 KK / 66 jiwa

Sumber Data : Dinsosnakertrans Kab. Purbalingga

C. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah, tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan karena tujuan serta sasaran prioritas pembangunan daerah dalam suatu periode belum tentu terkait dengan seluruh urusan pemerintahan. Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan dimaksud tidak diselenggarakan Pemerintah Daerah. Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai di masa-masa lalu atau memenuhi standar layanan bagi masyarakat. Analisis permasalahan pembangunan diseluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dimaksudkan guna menjamin diperolehnya identifikasi permasalahan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan, diluar permasalahan program pembangunan daerah.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Berdasarkan analisis Gambaran Umum selama 5 tahun, maka Permasalahan Pembangunan Kabupaten Purbalingga dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kemiskinan

Salah satu indikator utama dari tingkat kesejahteraan masyarakat adalah angka kemiskinan. Pada saat ini jumlah penduduk miskin Kabupaten Purbalingga sebesar 181.100 atau 20,53 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga. Dari jumlah tersebut, sebagian menempati rumah yang tidak layak huni. Data tahun 2015, jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga sebanyak 27.533 rumah, dan 3.526 (12,8 persen) diantaranya menyatu dengan kandang ternak, serta 13.894 (37,3 persen) diantaranya tidak memiliki jamban yang layak. Dari sisi pemenuhan kebutuhan pangan, tingkat konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Purbalingga masih di bawah standar pola pangan harapan, yaitu sebesar 87,90.

2. Pendidikan

Kinerja pembangunan pendidikan menjadi salah satu indikator utama untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan manusia. Indikator kinerja utama pembangunan pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Berdasarkan data tahun 2015, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Purbalingga sebesar 11,78 tahun, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah sebesar 6,85 tahun. Berdasarkan strata pendidikan, Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar di Kabupaten Purbalingga sudah cukup baik yaitu sebesar 109 sedangkan APK SMP/Sederajat sebesar 100, dan APK Sekolah Menengah/Sederajat baru sebesar 52,47. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Purbalingga, maka pembangunan pendidikan harus terus ditingkatkan. Dengan meningkatnya kualitas manusia antara lain melalui peningkatan pendidikan dengan sendirinya akan meningkatkan kemampuan dan daya saing setiap individu dalam mengakses sumberdaya sosial dan ekonomi. Oleh karena itu dengan meningkatnya pendidikan masyarakat dalam jangka panjang akan dapat mengurangi angka kemiskinan.

Meskipun layanan pendidikan di Kabupaten Purbalingga sudah menjangkau seluruh wilayah, tetapi masih dibutuhkan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan baik dari sisi kapasitas maupun kualitasnya antara lain berupa ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium, ruang guru, kamar mandi dan WC,

meubelair, alat peraga dan sebagainya. Pada tahun 2015 jumlah ruang kelas Sekolah Dasar dalam kondisi baik sebanyak 3.033 ruang, dalam kondisi rusak ringan sebanyak 311 ruang, dalam kondisi rusak sedang 67 ruang, dan dalam kondisi rusak berat sebanyak 32 ruang. Sedangkan untuk SMP masih terdapat 14 ruang dalam kondisi rusak berat, 6 ruang dalam kondisi rusak sedang, 74 ruang dalam kondisi rusak ringan dan 1.067 ruang dalam kondisi baik. Dalam penyediaan fasilitas perpustakaan, pada saat ini masih terdapat 180 SD, 73 MI, dan 10 SMP, serta 30 MTs yang belum memiliki ruang perpustakaan. Sementara itu dalam penyediaan ruang laboratorium IPA, 59 SMP dan 8 MTs yang memiliki ruang laboratorium. Demikian juga dalam penyediaan prasarana lainnya masih banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas kamar mandi dan WC yang layak dan terpisah antara kamar mandi/WC murid dan kamar mandi/WC guru. Dalam hal ketersediaan tenaga pendidik juga masih perlu untuk ditingkatkan baik dari sisi jumlah maupun kompetensinya. Pada tahun 2015, guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D4 baru mencapai 74,65 persen, guru SMP/MTs baru 35,82 persen, sedangkan guru SMA/SMK/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D4 baru mencapai 28,32 persen.

Permasalahan penting lainnya dalam pembangunan bidang pendidikan adalah terkait pemerataan akses layanan pendidikan khususnya bagi keluarga miskin. Pada saat ini masih terdapat 1.159 orang anak usia sekolah SD dan 2.167 orang anak usia sekolah SMP yang tidak sekolah dimana sebagian besar disebabkan karena faktor ekonomi (hasil pendataan oleh TKSK Tahun 2015). Data yang ada menunjukkan bahwa sebagian anak usia sekolah pendidikan dasar yang tidak sekolah merupakan penderita cacat, baik cacat fisik maupun cacat mental. Sehubungan dengan hal tersebut dibutuhkan kebijakan afirmatif agar anak-anak usia sekolah pendidikan dasar yang tidak sekolah dapat menikmati layanan pendidikan termasuk layanan pendidikan luar biasa.

3. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan menduduki posisi yang sangat penting dalam rangka peningkatan kualitas manusia. Kinerja pembangunan kesehatan menjadi penentu utama Indek Pembangunan

Manusia (IPM) yang merupakan indikator utama untuk menilai kinerja pembangunan manusia. Pada tahun 2015, IPM Kabupaten Purbalingga sebesar 67.02 dan menduduki peringkat ke 26 di Provinsi Jawa Tengah. Salah satu komponen IPM adalah Usia Harapan Hidup (UHH). Usia Harapan Hidup masyarakat Purbalingga pada tahun 2015 sebesar 72,80 tahun. Relatif rendahnya UHH Kabupaten Purbalingga antara lain karena beberapa indikator kinerja pembangunan kesehatan masih relatif rendah. Angka morbiditas di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 sebesar 16,5 persen, Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan sebesar 132 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH), sedangkan Angka Kematian Bayi sebesar 10,12 per 1000 KH.

Kinerja pembangunan kesehatan tidak terlepas dari ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Pada tahun 2015, dari 22 Puskesmas yang ada, belum ada Puskesmas yang terakreditasi. Sedangkan jumlah rumah sakit yang terakreditasi juga belum ada. Sementara itu jumlah Puskesmas yang melakukan layanan rawat inap Puskesmas baru sebanyak 11 puskesmas, dan jumlah Puskesmas mampu bersalin sebanyak 12 unit. Terkait dengan layanan persalinan, cakupan Puskesmas mampu PONEB sesuai standar baru mencapai 5 unit dan cakupan rumah sakit mampu PONEK sesuai standar baru mencapai 1 unit.

Akses sanitasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan derajat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2015 cakupan akses air bersih di Kabupaten Purbalingga baru mencapai 72,4 persen, sedangkan cakupan kepemilikan jamban baru mencapai 74,1 persen. Relatif rendahnya ketersediaan prasarana dan sarana sanitasi serta masih adanya budaya buang air besar di tempat terbuka memerlukan upaya sungguh-sungguh dalam rangka peningkatan akses sanitasi masyarakat. Cakupan desa Open Defecation Free (ODF) Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 baru mencapai 11 desa (4,6 persen).

Adanya prevalensi HIV-AIDS di tingkat nasional dan khususnya di Kabupaten Purbalingga yang cukup tinggi merupakan permasalahan yang harus segera ditanggulangi. Hal ini disebabkan karena HIV – AIDS merupakan *silent killer*, pembunuh tersembunyi yang pelan tapi pasti. Tren jumlah penderita HIV-AIDS terus meningkat dengan penderita usia produktif, reproduktif, dan bayi. Hal ini berdampak sangat luas baik

berupa dampak medis, psikologis, sosial, ekonomi, dan budaya/ agama. Dikhawatirkan adanya fenomena gunung es pada kasus HIV-AIDS karena terdapat orang berperilaku resiko tinggi antara lain wanita/ pria pekerja seks, pelanggan pekerja seks, pasangan pelanggan pekerja seks, pengguna NAPZA suntik dan pasangannya, LSL, waria, narapidana, dan anak jalanan. Diperlukan upaya maksimal guna mengendalikan epidemi HIV-AIDS, di samping juga perlu penanganan secara profesional pada orang yang telah terjangkit HIV-AIDS serta tersedianya antiretroviral (ARV).

4. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Meskipun kondisi prasarana jalan di Kabupaten Purbalingga terus mengalami peningkatan, tetapi masih perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan termasuk pembangunan jalan dan jembatan baru guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas transportasi antar wilayah. Pada tahun 2015 kondisi jalan di Kabupaten Purbalingga dalam kondisi baik sebesar 72,55 persen, Sedangkan jembatan dalam kondisi baik sebesar 93,36 persen.

Kondisi prasarana irigasi juga masih perlu mendapatkan perhatian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian khususnya padi. Pada tahun 2015 sawah beririgasi teknis di Kabupaten Purbalingga seluas 5.962 ha, setengah teknis seluas 6.029 ha, dan sawah tadah hujan seluas 2.407 ha.

Sementara itu untuk mewujudkan ketertiban pengelolaan tata bangunan gedung dan keamanan pemanfaatan gedung, diperlukan adanya produk hukum terkait penataan bangunan dan lingkungan serta peningkatan pelaksanaan sertifikasi laik fungsi gedung.

5. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat perlu peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana wilayah dan prasarana permukiman. Pada tahun 2015 di Kabupaten Purbalingga masih terdapat kawasan kumuh taraf ringan seluas 30,17 ha, dan kawasan kumuh taraf sedang seluas 2,22 ha. Di sisi lain masih banyak warga masyarakat yang belum memiliki akses terhadap sanitasi dan air bersih. Cakupan jamban masyarakat di Kabupaten Purbalingga baru

mencapai 71,4 persen, sedangkan cakupan akses air bersih baru mencapai 72,4 persen. Penanganan persampahan di Kabupaten Purbalingga juga belum optimal, dengan rasio sampah yang ditangani baru sebesar 10 persen. Terkait pemenuhan kebutuhan listrik, pada saat ini masih ada sebagian masyarakat yang belum menikmati fasilitas listrik, dengan rasio elektrifikasi sebesar 81 persen.

6. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Purbalingga dalam Pemilu masih dibawah 80 persen. Meskipun masih relatif lebih tinggi dibanding daerah lain, namun masih perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi politik rakyat.

Dalam rangka mencapai tujuan akhir pembangunan yaitu terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia mengharuskan adanya keseimbangan dalam penyelenggaraan pembangunan, yang meliputi keseimbangan antara pembangunan prasarana fisik dengan pembangunan manusia serta antara pemenuhan kebutuhan fisik manusia dengan pemenuhan kebutuhan moral spiritual termasuk pembangunan karakter dan pengembangan wawasan kebangsaan. Pada saat ini semakin nampak adanya fenomena sosial dimana masyarakat semakin permisif terhadap perilaku yang menyimpang dari norma dan etika sosial maupun keagamaan. Di sisi lain juga semakin dirasakan adanya penurunan kesetiakawanan sosial serta semangat patriotisme dan nasionalisme yang ditandai dengan menurunnya semangat gotong royong serta menurunnya kebanggaan dan kecintaan terhadap bangsa dan negara.

7. Sosial

Sesuai dengan landasan ideal dan konstitusional, pembangunan yang dilaksanakan harus melibatkan dan memberi manfaat secara merata bagi seluruh rakyat baik dalam perspektif kewilayahan maupun dalam perspektif strata sosial ekonomi masyarakat agar seluruh rakyat dapat ditingkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupannya secara layak dan bermartabat. Realita yang ada menunjukkan bahwa terdapat kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik, mental, sosial maupun ekonomi dengan berbagai sebab yang menyebabkan terbatasnya kemampuan untuk memperoleh kehidupan yang layak dan

bermartabat. Terhadap kelompok masyarakat seperti ini yang lazim disebut sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) perlu dilakukan kebijakan intervensi yang bersifat afirmatif.

Sampai dengan tahun 2015, jumlah dan persentase PMKS yang terlayani, dalam hal ini PMKS yang mendapatkan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar masih sangat terbatas. Demikian juga jumlah PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya masih sangat terbatas. Sesuai target SPM, jumlah PMKS yang harus ditangani pada tahun 2015 sebesar 80 persen.

8. Tenaga kerja

Meskipun lebih rendah dari angka pengangguran Provinsi Jawa Tengah, upaya untuk mengurangi angka pengangguran perlu terus dilakukan antara lain melalui peningkatan ketrampilan tenaga kerja dan fasilitasi penempatan tenaga kerja. Disisi lain Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi buruh melalui upaya pemenuhan hak-hak normatif buruh. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 sebesar 5,13 persen. Terkait pemenuhan hak normatif buruh, pada saat ini cakupan tenaga kerja di Kabupaten Purbalingga yang mendapat perlindungan jaminan sosial tenaga kerja sebesar 70 persen. Sedangkan rasio Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2016 sebesar Rp. 1.377.500,- atau 103,55 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Tahun 2016.

9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Dalam rangka pembangunan yang berkeadilan, perlu terus ditingkatkan upaya pengarusutamaan gender dan adanya kebijakan khusus terkait pemenuhan hak-hak anak. Indikator keberhasilan pengarusutamaan gender antara lain adalah Indek Pembangunan Gender (IPG) dan Indek Pemberdayaan Gender (IDG). Pada tahun 2014, IPG Kabupaten Purbalingga sebesar 90,12 (menempati urutan ke 24 di Provinsi Jawa Tengah). Sedangkan IDG Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 sebesar 71,03 (menempati urutan ke 11 di Provinsi Jawa Tengah). Isu gender dan anak selama ini harus diakui masih kurang memperoleh perhatian. Anak-anak sebagai generasi penerus dan pewaris masa depan

merupakan kelompok masyarakat yang rentan dan oleh karena itu harus ada kebijakan dan program yang nyata dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak. Masih adanya pekerja di bawah umur dan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tengah masyarakat yang sebagian besar diantaranya tidak diketahui (tidak dilaporkan) mengharuskan adanya peningkatan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data yang ada menunjukkan bahwa pada tahun 2015 jumlah pekerja di bawah umur (5 – 14 tahun) di Kabupaten Purbalingga sebanyak 533 orang dan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan dan ditangani sebanyak 16 kasus.

10. Pertanahan

Pembangunan fasilitas umum yang semakin pesat membutuhkan ketersediaan lahan yang memadai. Adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan lahan bagi pembangunan fasilitas umum seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas pendidikan dsb. Namun tidak semua kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan sudah tersedia lahannya. Pada beberapa kasus bangunan fisik sudah selesai namun lahannya belum selesai dibebaskan. Hal tersebut seringkali menjadi penghambat dalam proses pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga memiliki aset tanah yang cukup banyak dan jumlahnya menyebar, tapi belum semua aset tersebut terpetakan sehingga belum semua Tanah Milik Pemerintah Kabupaten bersertifikat.

11. Lingkungan Hidup

Pembangunan lingkungan hidup sangat penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Fungsi lingkungan hidup yang terjaga dan lestari akan mampu mendukung kehidupan manusia pada saat ini dan yang akan datang. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk maka terjadi ancaman degradasi lahan khususnya lahan pertanian. Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian tak terelakan. Lahan pertanian basah maupun kering berupa kebun hortikultura ataupun tegalan selain berfungsi menopang ketahanan pangan juga menjadi komponen ekosistem dan komponen daur hidrologi, sehingga apabila tidak ada pengendalian penggunaan

lahan baik untuk permukiman maupun industri akan mengancam ketahanan pangan dan keseimbangan ekosistem dan daur hidrologi. Berdasarkan data Status Lingkungan Hidup daerah (SLHD), pada tahun 2015 terjadi pengurangan tanah kering/tegalan sebanyak 8.367 ha, dan pengurangan sawah sebanyak 1.385,81 ha. Sedangkan lahan permukiman bertambah 7.748 ha (67 persen).

12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Efektivitas fungsi lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan akan sangat mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tingkat kemajuan desa mencerminkan efektivitas fungsi lembaga pemerintahan desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 sebesar 0,6394.

13. Pengendalian Penduduk dan KB

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 masih cukup tinggi yaitu sebesar 1,06 persen. Hal ini tentu membutuhkan upaya sungguh-sungguh dalam rangka peningkatan kepesertaan KB. Cakupan kepesertaan KB aktif di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 sebesar 76,22 persen, sedangkan cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB dan tidak terpenuhi (unmetneed KB) sebesar 12,5 persen, dan angka *drop out* KB sebesar 30 persen. Di sisi lain tingkat kesejahteraan keluarga masih perlu untuk terus ditingkatkan dimana jumlah keluarga sejahtera baru mencapai 55,01 persen dan jumlah keluarga pra sejahtera masih sebesar 24,9 persen.

14. Perhubungan

Semakin meningkatnya jumlah kendaraan dari tahun ke tahun yang tidak sebanding dengan peningkatan kapasitas prasarana jalan membutuhkan peningkatan kapasitas dan kualitas layanan angkutan darat guna meningkatkan kenyamanan layanan angkutan dan keselamatan lalu lintas. Penyelenggaraan perhubungan perlu dikembangkan sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk

mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa yang dinamis.

Terminal menjadi salah satu sarana perhubungan yang cukup penting. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi (Kepmenhub 35/2003). Jumlah terminal yang beroperasi di Kabupaten Purbalingga tahun 2011-2015 sebanyak 6 terminal dari kebutuhan sebanyak 10 terminal. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan terminal angkutan penumpang belum dapat memenuhi kebutuhan terminal. Penyelenggaraan perhubungan perlu dikembangkan sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa yang dinamis.

15. Komunikasi dan Informatika

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi pada saat ini menjadi sebuah keniscayaan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan dan komunikasi publik. Sampai dengan tahun 2015 jumlah SKPD yang memiliki website baru mencapai 25 SKPD dengan intensitas updating informasi rata-rata sebanyak 320 hari per tahun. Sementara itu jumlah Sistem Informasi Manajemen (SIM) milik Pemerintah Daerah yang berfungsi dan aktif sebesar 26 unit. Sedangkan jumlah pelayanan publik perangkat daerah yang telah dilaksanakan secara online baru 1 unit.

16. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu pilar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat akan meningkatkan kemampuannya dalam mengakses sumberdaya sosial dan ekonomi guna meningkatkan kesejahtraannya. Meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga relatif tinggi dibanding daerah lain, tetapi pendapatan perkapita masyarakat Purbalingga masih relatif rendah. Pada tahun 2014 PDRB per kapita Kabupaten Purbalingga sebesar Rp. 15,95 juta, masih jauh lebih rendah dibanding PDRB per kapita Provinsi Jawa

Tengah yaitu sebesar Rp. 27,61 juta, dan PDB per kapita Nasional sebesar Rp. 41, 81 juta. Hal ini antara lain disebabkan karena belum optimalnya pendayagunaan potensi ekonomi yang ada.

Kondisi agro ekologis wilayah Kabupaten Purbalingga yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya berbagai komoditas pertanian masih perlu untuk ditingkatkan pendayagunaannya antara lain melalui pengembangan komoditas pertanian yang bernilai tinggi sehingga akan meningkatkan nilai tambah sektor pertanian. Pengembangan kepariwisataan juga sangat memungkinkan untuk ditingkatkan termasuk pengembangan desa wisata yang dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan perkapita masyarakat karena memiliki efek multiplier yang luas.

Secara umum masih perlu peningkatan produktivitas dan daya saing sektor-sektor ekonomi rakyat yang meliputi sektor pertanian dalam arti luas, industri rakyat, dan sebagainya. Di sektor perdagangan, perlu peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana perdagangan terutama melalui revitalisasi pasar-pasar tradisional. Di sektor koperasi masih perlu pengembangan kehidupan berkoperasi dan peningkatan kualitas manajemen koperasi. Sementara itu untuk mendorong investasi di Kabupaten Purbalingga perlu peningkatan iklim investasi sehingga pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dan angka pengangguran semakin berkurang.

17. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan kepemudaan dan olahraga merupakan salah satu pendukung upaya pembangunan manusia. Salah satu tujuan dari pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga adalah memupuk dan mengembangkan semangat kepeloporan, patriotisme, nasionalisme serta mengembangkan jiwa sportifitas disamping juga dalam rangka meningkatkan kualitas jasmani generasi muda. Fasilitasi kegiatan kepemudaan dan olahraga masih perlu untuk ditingkatkan. Dalam tahun 2015, fasilitasi kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebanyak 6 (enam) kegiatan, sedangkan fasilitasi kegiatan olahraga sebanyak 26 kegiatan. Adapun prestasi olahraga Kabupaten Purbalingga di tingkat regional sebanyak 6 (enam) kejuaraan dan di tingkat nasional sebanyak 1 (satu) kejuaraan.

Salah satu tantangan dalam upaya pembangunan manusia khususnya dalam pembangunan kepemudaan adalah adanya kecenderungan meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba. Untuk itu perlu peningkatan sosialisasi bahaya narkoba khususnya di kalangan generasi muda.

18. Kebudayaan

Pembangunan bidang seni budaya merupakan salah satu upaya pembangunan karakter bangsa. Seni budaya, khususnya seni budaya nasional merupakan wahana internalisasi nilai-nilai luhur yang perlu untuk terus ditanamkan dan dikembangkan untuk memperkuat karakter dan integritas bangsa. Disamping itu, seni budaya secara umum dapat menjadi media untuk mengembangkan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Di tengah kehidupan yang semakin materialistis dan semakin menguatnya gelombang globalisasi, ada kecenderungan semakin menurunnya apresiasi terhadap seni budaya bangsa. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan dan program yang nyata dalam rangka peningkatan apresiasi terhadap seni budaya khususnya yang bersifat tradisional. intensitas kegiatan kajian, fasilitasi, pementasan serta pengiriman duta seni maupun pembinaan organisasi dan kelompok kesenian yang ada perlu terus ditingkatkan. Demikian juga berbagai kekayaan warisan sejarah berupa benda-benda cagar budaya yang sangat banyak di Kabupaten Purbalingga perlu terus dipelihara dan dijaga agar tetap lestari sehingga generasi yang akan datang dapat mengetahui akar budayanya.

19. Perpustakaan

Peningkatan kualitas manusia tidak hanya diukur dari tingkat pendidikan masyarakat. Ilmu yang dapat diserap oleh peserta didik di bangku pendidikan sangatlah terbatas dan lebih bersifat sebagai bekal dasar dan stimulasi bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu perlu dikembangkan semangat untuk menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi serta wawasan pengetahuan lainnya dalam masyarakat khususnya bagi anak-anak dan generasi muda antara lain melalui pengembangan budaya membaca. Peran perpustakaan sangat penting dalam rangka mendorong dan mendukung pengembangan budaya membaca. Jumlah perpustakaan di

Kabupaten Purbalingga pada saat ini sebanyak 312 unit yang terdiri dari 2 unit perpustakaan umum, 255 unit perpustakaan sekolah, 48 unit perpustakaan desa, dan 5 unit perpustakaan lainnya.